

**Memperkuat
Inklusi dan Kolaborasi
dalam
Pengurangan Risiko Bencana
Views from the Frontline 2019 di Indonesia**



YAKKUM Emergency Unit

Jl. Kaliurang KM 12 Dsn. Candi 3 No. 34
Sardonoharjo, Ngaglik, Sleman
DI Yogyakarta Indonesia
Phone +6274 882477
yeu@yeu.or.id | www.yeu.or.id

Memperkuat Inklusi dan Kolaborasi dalam Pengurangan Risiko Bencana

Views from the Frontline 2019 di Indonesia



**Funded by the
European Union**

Dokumen ini disusun dengan dukungan pendanaan dari European Union. Seluruh isi dalam dokumen ini sepenuhnya menjadi tanggung jawab organisasi yang menyusun laporan ini dan tidak serta merta mencerminkan pandangan European Union.

KATA PENGANTAR

Views from the Frontline (VFL) 2019 yang diinisiasi jaringan GNDR di 51 negara ini berangkat dari keyakinan bahwa kebijakan, program, dan kegiatan yang bertujuan untuk membangun ketangguhan masyarakat harus didasarkan pada prioritas mereka yang paling berisiko, komunitas yang berada di garda depan, mereka yang dengan daya upaya dan pengetahuannya pertama kali merespons ketika terjadi krisis maupun bencana di wilayahnya.

VFL dimulai sejak tahun 2009 melalui serangkaian survey kuantitatif dan kualitatif yang bertujuan untuk mengumpulkan perspektif para aktor lokal terhadap kemajuan target Kerangka Aksi Hyogo. Tahun 2011, VFL kembali dilakukan di Indonesia bekerja sama dengan Planas PRB dan Forum PRB di 9 provinsi dengan fokus pada tata kelola risiko daerah. Hasil VFL 2013 menunjukkan bahwa masyarakat menilai aset-aset penghidupan penting untuk diselamatkan. Gangguan pada sumber penghidupan menjadi perhatian masyarakat. Hasil temuan survey ditindaklanjuti melalui dialog kebijakan di tingkat provinsi pada 2015 dan sesudahnya.

Pada tahun 2019, VFL kembali dilakukan tidak hanya untuk mengumpulkan perspektif lokal namun juga memfasilitasi proses penyusunan rencana aksi komunitas dan pelaksanaannya. VFL menunjukkan bagaimana perspektif aktor-aktor lokal dalam kaitannya dengan progress pelaksanaan Kerangka Sendai untuk Pengurangan Risiko Bencana (SFDRR). Hasil VFL diharapkan dapat melengkapi alat pemantauan Kerangka Sendai yang disusun UNDRR dan lebih bersifat *top-down*, secara khusus untuk mengukur kemajuan pencapaian pendekatan inklusif dan "*people-centered*" dalam membangun resiliensi seperti yang tercermin dalam Kerangka Sendai namun tidak dipantau secara khusus dalam target-target SFDRR. Dengan mengisi celah ini, VFL 2019 dapat memberi informasi penting dan dasar untuk membantu pemerintah dan semua pemangku kepentingan lainnya untuk mengembangkan strategi PRB dan mencapai target SFDRR secara lebih efektif.

Keterlibatan dari anggota Komite Penasihat dan organisasi mitra pelaksana VFL 2019 yang beragam menjadi kekuatan VFL 2019 di Indonesia. Survey ini tidak akan terlaksana tanpa kerjasama dan dukungan dari berbagai pemangku kepentingan. Secara khusus kami mengucapkan terima kasih kepada Shivangi Chavda, Hepi Rahmawati dan Sekretariat GNDR Regional; Koordinator VFL GNDR dan tim, yang telah memberikan kepercayaan kepada

YEU untuk menjadi koordinator nasional dalam melaksanakan VFL 2019 di Indonesia dan mengangkat VFL 2019 di Indonesia dalam advokasi pada forum-forum global.

Kami juga menghaturkan terima kasih kepada Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) yang telah membuka ruang dialog sehingga dapat saling melengkapi temuan dan memperkaya rekomendasi. Dengan tulus kami ucapkan terima kasih kepada Komite Penasihat VFL; Dr. Raditya Jati (BNPB), Anggoro Budi Prasetya (Pudjiono Center), Ninil M. Jannah (Planas PRB), Johan Rachmat Santosa mewakili Partners for Resilience, Arshintia (YAKKUM), Dear Sinandang (Humanitarian Forum Indonesia), Estuning Tyas Wulan Mei (UGM), Agung D.H mewakili media dan Atin Saraswati mewakili sektor usaha atas masukan dan dukungannya secara sukarela merupakan hal yang sangat berharga bagi kami untuk memperkaya temuan survey.

Terima kasih yang dalam kami haturkan juga pada para responden kuisioner dari komponen pemerintah, organisasi masyarakat sipil dan masyarakat maupun peserta konsultasi nasional yang telah meluangkan waktu untuk bekerjasama dan mendukung kami, sehingga proses validasi dapat dilakukan dan memberi masukan yang berarti. Kami sangat mengapresiasi upaya dan kerjasama teman-teman organisasi mitra VFL 2019 (Perkumpulan Lingkar, Solidaritas Perempuan Kinasih, IPPMI DIY, Resilience Development Initiative, Walang Perempuan, Caritas Maumere, Care Peduli, dan Mariamoe Peduli) dan Partners for Resilience Indonesia yang telah mendukung proses pengumpulan data, memfasilitasi penyusunan rencana aksi dan memberi dukungan teknis pada komunitas setempat untuk merealisasikan rencana aksi di tengah pandemi COVID-19 yang tidak diprediksi sebelumnya maupun bencana yang terjadi.

Akhir kata, kami mohon maaf jika terdapat kekurangan dalam pelaksanaan VFL 2019 dari awal hingga akhir. Semoga proses dan hasil dari VFL 2019 memberikan pelajaran yang bermakna bagi kita semua dan bermanfaat untuk kemajuan PRB ke depan.

YAKKUM Emergency Unit
Koordinator Nasional VFL 2019 di Indonesia

Daftar Akronim dan Istilah

AIDS	<i>Acquired Immune Deficiency Syndrome</i>
API	Adaptasi perubahan iklim
BMKG	Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika
BNPB	Badan Nasional Penanggulangan Bencana
BPBD	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
BPD	Badan Permusyawaratan Desa
BUMDes	Badan Usaha Milik Desa
COVID-19	Penyakit Coronavirus
DAS	Daerah Aliran Sungai
Destana	Desa Tangguh Bencana
DLHK	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
FPRB	Forum Pengurangan Risiko Bencana
GNDR	Global Network of Civil Society Organisations for Disaster Reduction/ Jejaring Global OMS untuk Pengurangan Bencana
GPDRR	Global Platform for Disaster Risk Reduction/ Platform Global untuk Pengurangan Risiko Bencana
HIV	Human Immunodeficiency Virus
IDM	Indeks Desa Membangun
Inklusi	Pendekatan untuk membangun lingkungan yang terbuka untuk siapa saja dengan latar belakang dan kondisi yang berbeda-beda
IPCC	Intergovernmental Panel on Climate Change/ Panel Antarpemerintah tentang Perubahan Iklim
IPPMI DIY	Ikatan Pelaku Pemberdayaan Masyarakat Indonesia Daerah Istimewa Yogyakarta
IRBI	Indeks Risiko Bencana Indonesia
Kemendagri	Kementerian Dalam Negeri
Kemendes PDTT	Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi
Ketangguhan	Resiliensi/ kemampuan sistem, komunitas atau masyarakat yang terpapar bahaya untuk melawan, menyerap, mengakomodasi, beradaptasi, mengubah, dan pulih dari efek bahaya secara tepat waktu dan efisien, termasuk melalui pelestarian dan pemulihan struktur dasar yang esensial dan fungsi melalui manajemen risiko

Koramil	Komando Rayon Militer
LPM	Lembaga Pemberdayaan Masyarakat
MPTS	Spesies Pohon serbaguna
Musrenbangdes	Musyawaharah Perencanaan Pembangunan Desa
OMS	Organisasi Masyarakat Sipil
OPD	Organisasi Perangkat Desa
OPDis	Organisasi Penyandang Disabilitas
PAUD	Pendidikan Anak Usia Dini
PDB	Produk Domestik Bruto
Planas PRB	Platform Nasional Pengurangan Risiko Bencana
PPKM	Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat
PRB	Pengurangan Risiko Bencana
PRBBK	Pengelolaan risiko bencana berbasis Komunitas
RDI	Resilience Development Initiative
Risiko bencana	Potensi kerugian yang ditimbulkan akibat bencana pada suatu kawasan dan kurun waktu tertentu yang dapat berupa kematian, luka, sakit, jiwa terancam, hilangnya rasa aman, mengungsi, kerusakan atau kehilangan harta, dan gangguan kegiatan masyarakat
RKPDes	Rencana Kerja Pemerintah Desa
RPJMN	Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional
RT	Rukun Tetangga
SDG	Sustainable Development Goals/ Tujuan Pembangunan Berkelanjutan
SFDRR	Sendai Framework for Disaster Risk Reduction/ Kerangka Sendai untuk PRB
SITATANG	Siap, Tanggap, Tangguh
SP Kinasih	Solidaritas Perempuan Kinasih
TNI	Tentara Nasional Indonesia
TNP2K	Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan

Daftar Isi

Kata Pengantar	i
Daftar Akronim dan Istilah	iii
Daftar Isi	v
BAB I LATAR BELAKANG	1
1.1 Kondisi Umum di Indonesia	1
1.2 Views from the Frontline 2019	3
1.3 Relevansi VFL 2019 dalam Memperkuat Ketangguhan di Indonesia	4
1.4 Proses VFL 2019 di Indonesia	5
1.5 Pemilihan Area Risiko, Komunitas, dan Sampling	6
A. Pemilihan Area Risiko	6
B. Pemilihan Komunitas (Kelurahan/Desa)	7
C. Total Sampel	7
BAB II REFLEKSI DAN AKSI VFL 2019	9
2.1 Refleksi VFL 2019	9
Profil Risiko	9
Tata Kelola Risiko	12
Lingkungan Pendukung	14
Aspek Inklusi dalam Pelaksanaan VFL 2019	18
Aspek Akuntabilitas dalam Pelaksanaan VFL 2019	19
2.2 Aksi VFL 2019	20
A. Aksi di Tingkat Lokal	21
Aksi Komunitas di Jawa Barat	24
Aksi Komunitas di DI Yogyakarta	28
Aksi Komunitas di Maluku	34
Aksi Komunitas di Nusa Tenggara Timur	37
B. Aksi di Tingkat Nasional	47
BAB III REKOMENDASI DAN LANGKAH KE DEPAN	53
3.1 Rekomendasi	53
3.2 Keberlanjutan dan Langkah ke Depan	54
Mitra Organisasi VFL 2019	55

BAB I

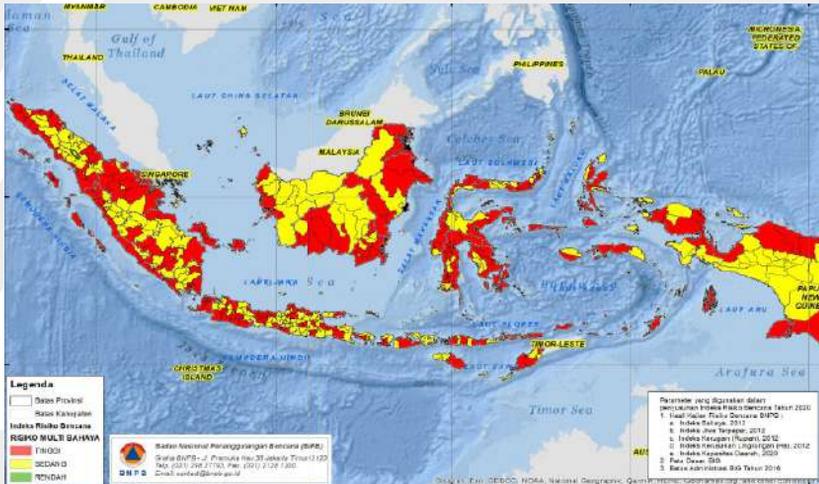
LATAR BELAKANG

1.1 Kondisi Umum di Indonesia

Indonesia merupakan negara dengan populasi terbesar keempat di dunia dengan jumlah penduduk mencapai 270,20 juta jiwa atau rata-rata meningkat 1,25% setiap tahunnya pada tahun 2010-2020. Dari sisi demografis, Badan Pusat Statistik tahun 2020 melaporkan bahwa sekitar 70,72% penduduk Indonesia berusia 15-64 tahun. Artinya, Indonesia tengah mengalami bonus demografi yang akan berlangsung hingga dua dekade ke depan yang merupakan peluang besar untuk meningkatkan perekonomian negara, meskipun PDB Indonesia mengalami penurunan sebesar 2,1% pada tahun 2020 akibat pandemi. Di sisi lain, jumlah lansia yang saat ini telah mencapai 9,72% diproyeksikan meningkat menjadi sekitar 20% pada tahun 2024 atau 25% pada tahun 2050. Sekitar 22,5 juta atau 5% dari total penduduk adalah penyandang disabilitas. Sebagian besar lansia dan penyandang disabilitas hidup dalam kemiskinan, dan kedisabilitasan dapat meningkat seiring bertambahnya usia, hal ini membuat mereka lebih rentan terhadap berbagai risiko dan guncangan (TNPK, 2020). Perempuan, anak-anak dan kelompok marjinal lainnya juga memiliki kerentanan yang besar terhadap bencana karena aksesibilitas, ketidaksetaraan gender, latar belakang budaya, dan aspek lainnya.

Secara geografis, negara kepulauan Indonesia terletak pada pertemuan lempeng tektonik bumi, menjadikan wilayahnya rawan terhadap bencana akibat ancaman geologi seperti gempa bumi, tsunami, dan letusan gunung berapi. Dengan kondisi perubahan iklim saat ini, Indonesia juga rentan terhadap bencana hidrometeorologi. Badan Nasional Penanggulangan Bencana mencatat pada tahun 2020 terjadi 2.952 bencana. Bencana-bencana tersebut menyebabkan 370 orang meninggal dunia, 537 orang luka-luka dan 6.450.903 orang terkena bencana (BNPB, 2020). Lebih dari 90% bencana yang terjadi dikategorikan sebagai bencana yang dipicu oleh perubahan iklim seperti banjir, siklon, gelombang pasang yang ekstrim, cuaca ekstrim dll. Laporan penilaian ke-6 IPCC mencatat bahwa di wilayah Asia Tenggara, siklon tropis yang lebih ekstrim telah mempengaruhi wilayah. Meski wilayah ini diproyeksikan memanas sedikit lebih rendah dari rata-rata global, tapi permukaan laut naik lebih cepat di wilayah ini dibandingkan di tempat lain.

Tren ini diprediksi berlanjut selama beberapa dekade mendatang. Laporan BMKG juga mencatat bahwa dari 2008-2016 hanya tiga siklon yang terjadi di wilayah Indonesia, namun intensitasnya meningkat sejak 2017-2021 bahkan dapat terjadi dua kali dalam setahun. Dengan kondisi geografis dan proyeksi iklim ini, para pemangku kepentingan perlu membangun ketangguhan terhadap bencana dan perubahan iklim serta melakukan upaya mitigasi dini untuk mengurangi risiko dengan mempertimbangkan kebutuhan dan kapasitas masyarakat yang berisiko.



Gambar 1. Peta Indeks Risiko Bencana Kabupaten/Kota Tahun 2020 (sumber : IRBI 2020, BNPB)

Views from the frontline (VFL) 2019 adalah kajian independen terbesar di tingkat global untuk pengurangan risiko bencana di tingkat lokal yang diinisiasi oleh Global Network of Civil Society Organisations for Disaster Reduction (GNDR)¹. VFL bertujuan untuk memperkuat keterlibatan aktif dan kolaborasi diantara masyarakat berisiko, organisasi masyarakat sipil dan pemerintah dalam merancang dan melaksanakan kebijakan dan program-program pengurangan risiko bencana dan ketangguhan² masyarakat.

VFL 2019 menghasilkan data dasar di tingkat lokal dan proses monitoring untuk mengukur capaian dalam rangka membangun ketangguhan dengan pendekatan yang berpusat pada masyarakat sesuai dengan Kerangka Sendai untuk Pengurangan Risiko Bencana dan kerangka Agenda 2030 lainnya. Untuk itu, VFL 2019 juga bertujuan untuk meningkatkan kesadaran dan memperkuat akuntabilitas pemerintah dan badan pemerintah terhadap pendekatan yang berpusat pada masyarakat.

VFL 2019 mengambil perspektif sistem yang luas, yang mengakui bahwa setiap aktor memiliki peran dan tanggung jawab yang saling terkait di level administrasi yang berbeda. Wawancara di tingkat lokal, dilengkapi pertanyaan-pertanyaan survey yang menasar informan kunci yang bekerja di tingkat provinsi, kabupaten hingga lingkup desa/kelurahan termasuk pemerintah. Pertanyaan terkait "lingkungan yang mendukung" dirancang untuk meningkatkan kesadaran dan menilai perkembangan faktor-faktor institusional yang lebih luas yang penting untuk memperkuat aksi di tingkat lokal, dukungan politik yang diperlukan sehingga gap dan tantangan dapat diselesaikan melalui aksi-aksi yang saling menguatkan diantara beragam aktor di level yang berbeda pula. Keseluruhan proses survey ini dilakukan oleh aktor lokal sehingga meningkatkan kapasitas mereka dalam memonitor dan menggunakan informasi risiko di tingkat lokal.

¹ GNDR merupakan jaringan global yang terbentuk pada 2007. Saat ini GNDR memiliki 1468 anggota organisasi yang ada di 127 negara. GNDR bekerja untuk mencegah ancaman seperti banjir, kekeringan, gempa bumi, penyakit menular dan sebagainya menjadi bencana dengan memperkuat sumber daya, kekuatan dan kapasitas komunitas untuk beradaptasi dengan potensi bahaya dan mengurangi risiko yang dihadapi. Kegiatan utama GNDR antara lain advokasi pembangunan dan pelokalan berdasarkan informasi risiko, dan penguatan kapasitas untuk organisasi masyarakat sipil. Untuk info lebih lanjut www.gndr.org

² Saat ini kata resiliensi sudah diadopsi dalam Bahasa Indonesia sehingga dapat digunakan secara resmi. Pada laporan ini, kata ketangguhan dan resiliensi digunakan bergantian, namun menjelaskan makna yang sama.

Relevansi VFL 2019 dalam Memperkuat Ketangguhan di Indonesia

Salah satu kunci untuk membangun ketangguhan masyarakat terhadap bencana adalah dengan mendukung aksi pengurangan risiko bencana di tingkat komunitas. Untuk itu, penting untuk memahami risiko bencana dari perspektif masyarakat. Dalam VFL 2019, ada 3 aspek yang dikaji yaitu (1) Profil Risiko, (2) Tata Kelola Risiko yang inklusif, dan (3) Lingkungan pendukung. Profil risiko mengidentifikasi prioritas ancaman dan risiko, tantangan/hambatan dan aksi yang perlu dilakukan baik dari sudut pandang masyarakat, pemerintah, organisasi masyarakat sipil di wilayah setempat. Pemetaan risiko yang partisipatif dan inklusif penting dilakukan untuk memastikan rasa kepemilikan komunitas terhadap kajian ini. VFL memotret realitas lokal dengan berkolaborasi bersama aktor-aktor lokal yang telah bekerja di komunitas setempat dan secara langsung menjangkau masyarakat dan pemangku kepentingan di wilayah setempat melalui wawancara dan pengamatan di wilayah tersebut sehingga dapat memahami perspektif komunitas dengan lebih baik. Persepsi komunitas mengenai prioritas risiko, aksi, dan hambatan mungkin berbeda dengan persepsi pemerintah maupun tenaga ahli. VFL juga mengevaluasi manajemen risiko dan lingkungan pendukung yang dapat mendorong ketangguhan masyarakat dan penanggulangan bencana.



Profil Risiko

- Prioritas ancaman;
- Konsekuensi;
- Aksi;
- Hambatan;
- Tren kerugian dari waktu ke waktu;
- Ancaman dalam kurun waktu 10 tahun.



Tata Kelola Risiko yang Inklusif

Sejauh mana komunitas dilibatkan oleh aktor-aktor yang berbeda dalam penilaian, perencanaan, pelaksanaan, dan pemantauan atas risiko di wilayahnya.



Lingkungan Pendukung

Sejauh mana sumber daya, kapasitas, aturan, kepemimpinan, koherensi kebijakan dan faktor lain memberikan kontribusi pada pelibatan aktor lokal dalam membangun ketangguhan.

Di Indonesia, upaya membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana, dan perubahan iklim ditetapkan sebagai salah satu prioritas nasional di dalam RPJMN 2020-2024. Secara lebih spesifik, prioritas nasional dijabarkan dalam tiga kelompok kebijakan yaitu (1) meningkatkan kualitas lingkungan hidup; (2) meningkatkan ketahanan

bencana dan iklim; serta (3) menerapkan pendekatan pembangunan rendah karbon. Beberapa strategi untuk mewujudkan arah kebijakan ini meliputi penguatan data, informasi dan literasi bencana serta penguatan sistem, regulasi dan tata kelola risiko bencana. Analisa temuan VFL dan pelaksanaan rencana aksi sebagai tindak lanjutnya diharapkan dapat melengkapi data risiko yang sudah ada, selain untuk menilai risiko dari perspektif lokal namun juga menjadi alat untuk memonitor sejauh mana upaya PRB dan ketangguhan masyarakat telah dilakukan masyarakat, pemerintah maupun aktor lainnya dan masuk dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan hingga di lingkup terkecil yaitu desa/kelurahan.

1.4 Proses VFL 2019 di Indonesia

Pelaksanaan VFL terdiri dari 2 tahap :

1 Tahap Persiapan

YAKKUM Emergency Unit sebagai Koordinator VFL di Indonesia menyelenggarakan pertemuan konsultasi dengan mengundang komite penasihat dari beragam latar belakang untuk mendapatkan rekomendasi dan menyepakati area risiko untuk target survey. Dari pertemuan ini, disepakati 4 area risiko yaitu :

Area risiko 1: DI Yogyakarta (risiko gempa bumi dan pembangunan)

Area risiko 2: Jawa Barat (risiko di kawasan perkotaan dan industri)

Area risiko 3: Maluku (dampak perubahan iklim di kepulauan kecil)

Area risiko 4: Nusa Tenggara Timur (risiko akibat ancaman hidrometeorologi)

Keempat area risiko ini masuk dalam kategori provinsi dengan risiko tinggi dalam indeks risiko bencana. Komite penasihat memberikan rekomendasi organisasi mitra pelaksana yang dapat bekerja bersama melaksanakan proses pengumpulan data dan rencana aksi di tingkat lokal.

2 Tahap Pelaksanaan

Pelaksanaan VFL terbagi menjadi 3 fase yaitu pengumpulan data, analisis data dan rencana aksi serta pelaksanaannya. Pengumpulan data dilakukan oleh 8 organisasi mitra pelaksana yang terdiri dari SP Kinasih, Lingkaran dan IPPMI DIY yang melakukan survey di Yogyakarta, Resilience Development Initiative di Jawa Barat, Yayasan Walang Perempuan di Maluku, dan Yayasan Mariamoe Peduli, Caritas Maumere, dan Care Peduli di Nusa Tenggara Timur. Organisasi mitra telah bekerja di area survey sebelumnya baik dalam program berbasis masyarakat,

penelitian, maupun monitoring dan evaluasi program pemerintah. Organisasi mitra pelaksana melakukan 4 jenis survey di tiap komunitas (desa/kelurahan) yaitu wawancara dengan 7-13 responden pemerintah setempat (tingkat desa/kecamatan/kabupaten), wawancara dengan 4-10 responden dari organisasi masyarakat sipil di wilayah setempat, survey individu untuk rumah tangga berjumlah sekitar 40-135 responden di tiap komunitas atau 10% dari total rumah tangga di komunitas setempat, dan 5 diskusi kelompok terpusat yang masing-masing terdiri dari 8-10 responden (kelompok laki-laki, perempuan, lansia, disabilitas, dan anak-remaja). Dari 21 komunitas target survey, ada 2949 responden yang terlibat dalam survey ini dengan 7 komunitas di kawasan perkotaan dan 14 komunitas di pedesaan. Hasil survey diinput ke dalam sistem surveygizmo untuk diproses dan dianalisa, hasil data visual ditampilkan melalui website VFL www.gndr.org/project/views-from-the-frontline

1.5

Pemilihan Area Risiko, Komunitas dan Sampling

A. Pemilihan Area Risiko

Area risiko dipilih berdasarkan 4 aspek berikut ini :

1) Indeks Risiko Bencana

Pada saat VFL 2019 diluncurkan, data Indeks Risiko Bencana (IRBI 2018) menunjukkan 16 provinsi berada pada kelas risiko bencana tinggi dan 18 provinsi berada pada kelas risiko bencana sedang dan tidak ada provinsi yang berada pada risiko bencana rendah. Tiga provinsi yang berisiko paling tinggi yaitu Banten (skor 173,81), Bengkulu (skor 163,29), dan Sulawesi Barat (skor 162,92). Untuk itu, VFL diupayakan dilakukan pada provinsi-provinsi dengan kategori risiko tinggi maupun sedang.

2) Tipe Ancaman

Indeks Risiko Bencana ditentukan dari indeks ancaman, kerentanan dan kapasitas. Ancaman antara lain seperti gempa bumi, tsunami, banjir, erupsi gunung api, kekeringan, kebakaran hutan atau lahan, cuaca ekstrem, gelombang pasang ekstrem dan abrasi maupun banjir bandang. Sebagai perbandingan, area risiko dipilih dari tipe yang berbeda yaitu geologi (terkait pergerakan lempeng) maupun hidrometeorologi (terkait dengan perubahan iklim).

3) Karakteristik Area Risiko

Selain tipe ancaman, karakteristik area juga menjadi pertimbangan dalam pemilihan area risiko seperti perkotaan dan pegunungan,

kepulauan kecil, daerah pesisir atau pegunungan, daerah aliran sungai. Hal ini untuk melihat perbedaan perspektif masyarakat terkait profil risiko, tata kelola risiko, dan lingkungan pendukung.

4) Kerentanan Terhadap Pembangunan

Pembangunan yang tidak berbasis PRB dan perubahan iklim akan meningkatkan kerentanan masyarakat terhadap bencana. Area risiko ini juga dipilih untuk mengidentifikasi dampak pembangunan yang terjadi di wilayah survey.

B. Pemilihan Komunitas (Kelurahan/Desa)

Komunitas dipilih berdasarkan rekomendasi dari komite penasihat dan usulan yang diajukan oleh organisasi mitra pelaksana. Komunitas target merepresentasikan kawasan perkotaan dan pedesaan. Adapun perbedaan ini dilihat dari total luas wilayah, perbandingan luas wilayah dan kepadatan penduduk, karakter komunitas (kohesi sosial atau individual), tipe mata pencaharian (homogen atau beragam), dan ketersediaan fasilitas umum dan infrastruktur yang memadai.

C. Total Sampel

Identifikasi sampel :

- Di tiap komunitas, setidaknya ada 10 responden berasal dari pemerintah setempat (perangkat desa/kelurahan, pemerintah kecamatan, OPD seperti Dinas Kesehatan, BPBD, Bappeda, Dinas PU, dsb) dan 10 responden dari organisasi berbasis masyarakat atau organisasi masyarakat sipil diantaranya karang taruna, PKK, LSM, organisasi berbasis iman, dsb.
- Responden untuk survey rumah tangga setidaknya berjumlah 10% dari total Kepala Keluarga di Desa/Kelurahan setempat dengan jumlah minimal 40 dan maksimal 133 responden. Sebagai ilustrasi, jika jumlah KK di desa 1157, maka sampel untuk survey rumah tangga berjumlah 100 responden. Namun jika lebih dari 2000, maka sampelnya adalah 133 responden.
- Di tiap komunitas, ada 5 diskusi kelompok terpumpun terdiri dari kelompok laki-laki, perempuan, lansia, disabilitas, dan anak-remaja. Setiap kelompok diupayakan terdiri dari 8-10 responden.
- Rasio jenis kelamin untuk keseluruhan responden adalah 1:1 termasuk juga disabilitas, kelompok masyarakat adat dan marjinal.
- Realisasi jumlah survey Rumah Tangga (RT), Masyarakat Sipil (MS), Pemerintah Setempat (PS), dan Diskusi Kelompok Masyarakat (DKM) per area risiko dan per komunitas sebagai berikut :

Area Risiko	Komunitas	Organisasi Mitra	Sampel			
			RT	PS	MS	DKM
Yogyakarta	Sampang	Perkumpulan Lingkar	100	10	11	5
	Kedundang	SP Kinasih	98	10	4	5
	Wukirsari Dlingo	IPPMI DPD DIY	132	9	5	5
			135	9	10	5
Jawa Barat	Jambudipa Pagerwangi Ciumbuleuit Taman Sari	RDI	133	7	6	5
			133	10	10	5
			132	10	10	5
			134	10	10	5
Maluku	Leahari Hatiwe Besar Hukurila	Walang Perempuan	40	9	10	5
			100	10	10	5
			40	13	10	5
Nusa Tenggara Timur	Wajur Pangga	Mariamoe Peduli	46	11	10	5
			45	10	10	5
	Oekiu Oelbiteno	Care Peduli	35	11	10	5
			35	10	10	5
	Wolorega Gera Korobhera Bu Watuweti Done Kolisia B	Caritas Maumere	70	10	10	5
			45	10	11	5
			40	10	10	5
			40	10	10	5
	40	10	4	5		
	40	9	5	5		
TOTAL Survey/Wawancara/FGD			1613	211	192	105
TOTAL Responden			1613	211	192	933
Persentase responden per jenis survey			54.7%	7.2%	6.5%	31.6%
TOTAL KESELURUHAN			2949 Responden			

Persentase Responden Survey



47%
Responden Perempuan



7%
Responden Anak & Remaja



4%
Responden Disabilitas



7%
Responden Lansia

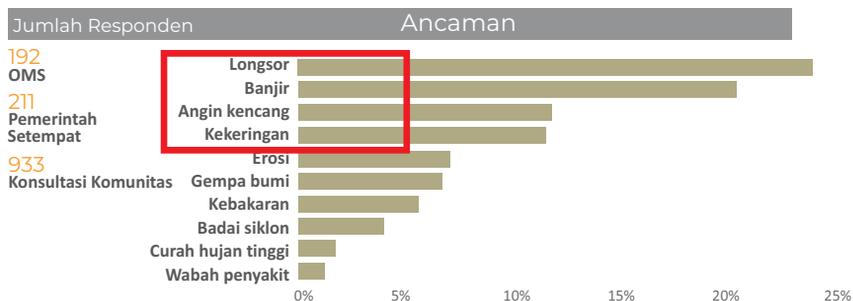
BAB II

REFLEKSI DAN AKSI VFL 2019

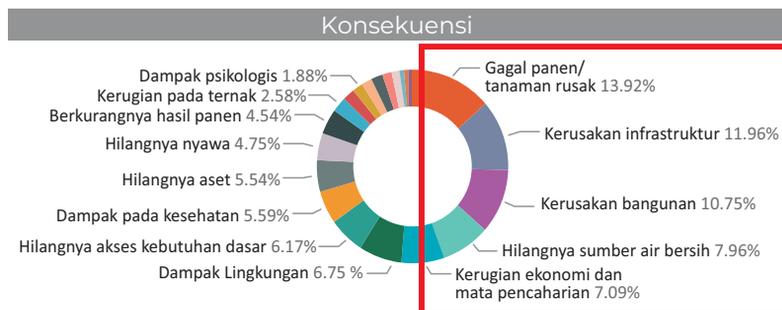
2.1 Refleksi VFL 2019

Temuan VFL 2019 menyimpulkan bahwa kondisi iklim yang ada, seperti perubahan curah hujan ditambah dengan kerusakan lingkungan memicu peningkatan ancaman hidrometeorologi antara lain banjir, tanah longsor, kekeringan, angin kencang, dan abrasi. Banjir tidak hanya dialami komunitas yang tinggal di pedesaan, namun juga rawan dan kerap terjadi di perkotaan. Survey menunjukkan bahwa perempuan dan anak-anak paling terdampak oleh kekeringan. Survey juga menyoroti kekhawatiran lanjut usia terutama yang tinggal di daerah pesisir kepulauan akan naiknya permukaan air laut karena telah merusak infrastruktur dan menyebabkan hilangnya aset. Reboisasi dan teknik pertanian tangguh menjadi beberapa prioritas aksi yang kerap muncul dari perspektif komunitas untuk mengatasi risiko tersebut. Kesimpulan VFL di setiap komunitas dipaparkan secara lebih detail pada bagian berikutnya. Di bawah ini merupakan kesimpulan VFL secara keseluruhan menurut 3 aspek yang dikaji.

A. Profil Risiko

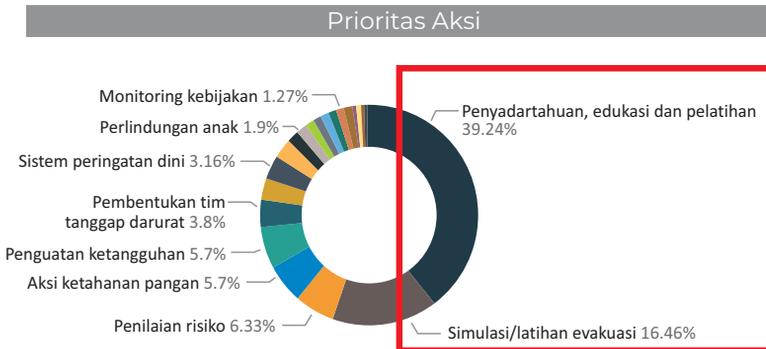


Grafik 1.1 Prioritas Ancaman menurut seluruh responden

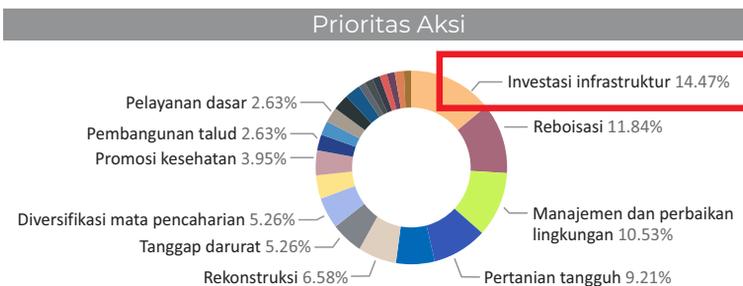


Grafik 1.2 Prioritas Konsekuensi menurut seluruh responden

- Lima prioritas ancaman utama pada Grafik 1.1 meliputi ancaman terkait hidrometeorologi yaitu longsor, banjir, angin kencang, kekeringan, dan erosi. Prioritas ancaman tidak jauh berbeda diantara responden pemerintah, organisasi masyarakat sipil maupun komunitas secara umum.
- Lima prioritas konsekuensi yang dialami responden akibat ancaman ini terlihat pada Grafik 1.2 antara lain gagal panen/kerusakan tanaman, kerusakan infrastruktur, kerusakan bangunan, hilangnya sumber air bersih, dan kerugian pada ekonomi dan mata pencaharian. Prioritas konsekuensi tidak jauh berbeda diantara responden pemerintah, organisasi masyarakat sipil, maupun komunitas secara umum.
- Dari grafik 1.3 terlihat bahwa aksi pengurangan risiko bencana yang perlu dilakukan menurut responden pemerintah antara lain penyadartahuan, edukasi dan pelatihan, diikuti simulasi bencana dan penilaian risiko. Sementara menurut komunitas secara umum, reboisasi, manajemen ekosistem dan perbaikan lingkungan, serta teknik pertanian tangguh menjadi prioritas aksi.

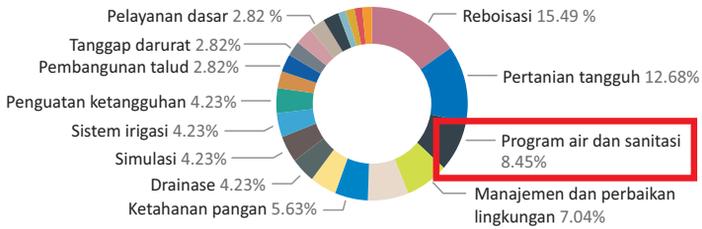


Grafik 1.3 Prioritas Aksi menurut Pemerintah



Grafik 1.4 Prioritas Aksi menurut komunitas (laki-laki)

Prioritas Aksi



Grafik 1.5 Prioritas Aksi menurut komunitas (perempuan)

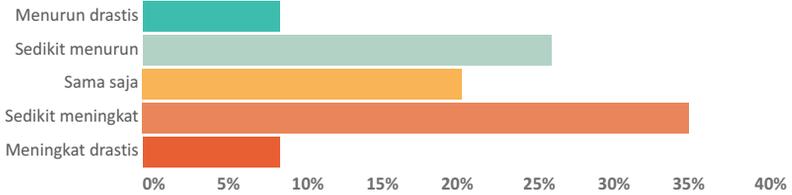
- Bagi responden perempuan, aksi terkait air dan sanitasi penting menjadi prioritas dalam aksi PRB mengingat ancaman hidrometeorologi seperti banjir, kekeringan membawa konsekuensi pada hilangnya sumber air bersih dan gangguan pada perilaku hidup bersih. Responden laki-laki menyebut investasi terhadap penguatan infrastruktur dan upaya mitigasi penting menjadi prioritas aksi.
- Hal ini menunjukkan kombinasi upaya mitigasi dan adaptasi perlu mendapat perhatian yang seimbang dan dilakukan secara paralel. Penilaian risiko semakin bermanfaat jika dilengkapi dengan analisa informasi iklim, aset dan ekonomi masyarakat dan gender.



“Setelah gempa tidak ada lagi bencana yang terjadi, gotong royong rutin dilakukan, misalnya membersihkan jalan penghubung antar dusun. Saat ini di musim kemarau, kami masih membeli air, meskipun pemerintah sudah mengebor sumur tetapi tidak mencukupi untuk seluruh masyarakat”

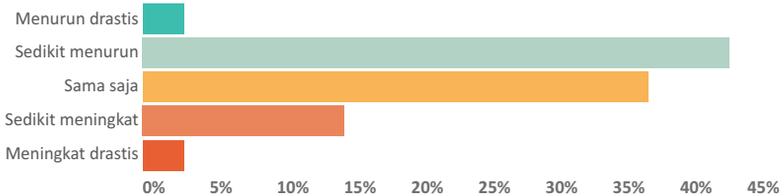
Lasimin - Kalurahan Sampang
Gunungkidul DI Yogyakarta

Kerugian Bencana (nyawa, aset, masa pencaharian) dalam 5-10 tahun ke belakang



Grafik 1.6 Tren Bencana menurut Perempuan Lanjut Usia

Kerugian Bencana (nyawa, aset, masa pencaharian) dalam 5-10 tahun ke belakang



Grafik 1.7 Tren Bencana menurut Laki-laki Lanjut Usia

- Sekitar 36% dari keseluruhan responden menyatakan bahwa tren bencana tidak berubah dalam 5-10 tahun terakhir, sementara 32% lainnya menyatakan meningkat sedikit (24%) maupun drastis (8%). Hal ini juga tidak jauh berbeda jika dibandingkan antara responden pemerintah, organisasi masyarakat sipil, dan komunitas. Demikian pula, responden disabilitas dan lanjut usia dari komunitas.
- Perbandingan persepsi antara responden disabilitas, lansia dan remaja menunjukkan bahwa responden lansia lebih banyak menyebut kerugian bencana meningkat dalam 5-10 tahun belakang yakni sekitar 33% sementara disabilitas 26% dan remaja 16%. Kerugian bencana ini paling dirasakan meningkat oleh perempuan lanjut usia seperti ditunjukkan pada grafik 1.6.

B. Tata Kelola Risiko

Kunci

1 - Tidak sama sekali

2 - Jarang/Tidak seluruhnya

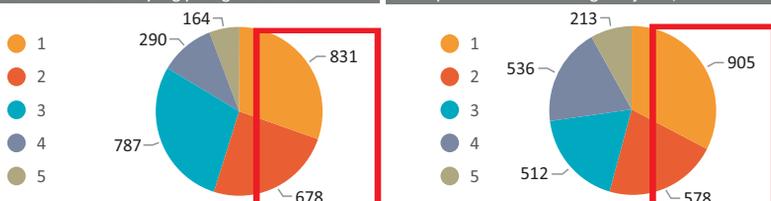
3 - Kadang-kadang

4 - Ya, dengan batasan tertentu

5 - Ya, dengan sangat efektif/bertindak

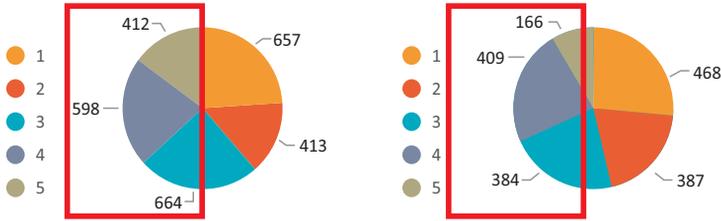
Penilaian: Pelibatan warga, termasuk kelompok yang paling rentan, oleh pemerintah setempat untuk menilai risiko yang paling dirasakan

Perencanaan: Pelibatan warga, termasuk dengan kelompok yang paling rentan, oleh pemerintah setempat dalam merancang kebijakan/rencana PRB



Pelaksanaan: Pelibatan warga, termasuk kelompok yang paling rentan, dalam pelaksanaan aksi PRB oleh pemerintah setempat

Monitoring: Pelibatan perwakilan warga dalam tim pemantauan pembangunan guna meningkatkan ketangguhan oleh pemerintah setempat



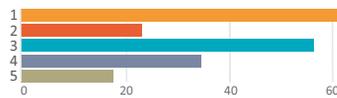
Grafik 2.1 Pelibatan Masyarakat oleh Pemerintah

- Pada aspek tata kelola risiko, survey berupaya memotret partisipasi masyarakat mulai dari tahap penilaian, perencanaan, pelaksanaan hingga monitoring program-program terkait pengurangan risiko bencana oleh pemerintah. Grafik 2.1 menunjukkan bahwa komunitas lebih banyak dilibatkan dalam pelaksanaan dan pemantauan program dibandingkan dalam penilaian dan perencanaan program atau kebijakan terkait PRB. Untuk itu, diperlukan upaya-upaya yang sistematis untuk memastikan komunitas termasuk kelompok berisiko dapat berpartisipasi secara bermakna tidak hanya pada tahap pelaksanaan dan monitoringnya, namun juga dalam penilaian risiko dan perencanaan.

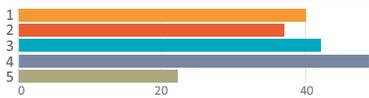
Kunci

1 - Tidak sama sekali 2 - Jarang/Tidak seluruhnya 3 - Kadang-kadang
4 - Ya, dengan batasan tertentu 5 - Ya, dengan sangat efektif sekali

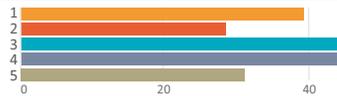
Penilaian: Pelibatan masyarakat, termasuk kelompok yang paling rentan, oleh OMS untuk penilaian risiko/ancaman



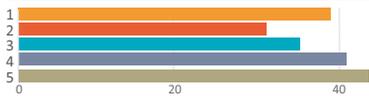
Perencanaan: Pelibatan masyarakat, termasuk kelompok yang paling rentan, oleh OMS dalam perencanaan aksi PRB



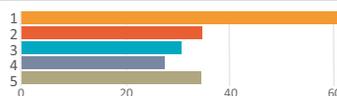
Pelaksanaan: Pelibatan masyarakat, termasuk kelompok yang paling rentan, oleh OMS dalam pelaksanaan PRB



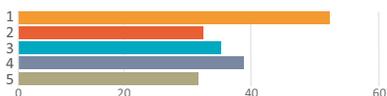
Berbagi-pengetahuan: Dukungan OMS bagi komunitas, termasuk kelompok yang paling rentan untuk berbagi pengetahuan pada pihak lain



Penguatan kapasitas: Sejauh mana OMS memperkuat kapasitas komunitas dan mengurangi hambatan untuk berpartisipasi membangun ketangguhan



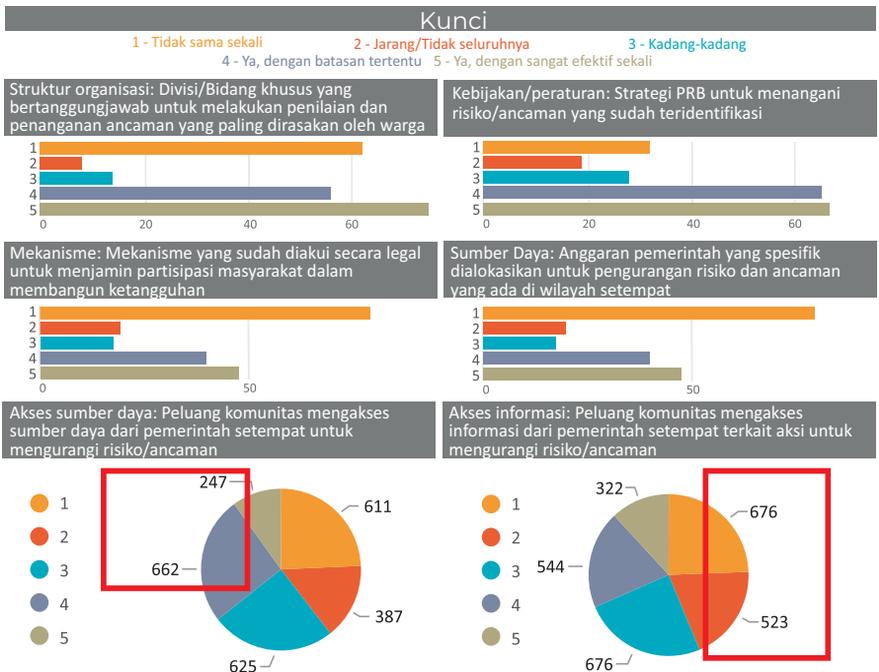
Advokasi: OMS secara aktif mengadvokasikan prioritas komunitas dalam platform/forum nasional terkait PRB



Grafik 2.2 Pelibatan Masyarakat oleh Organisasi Masyarakat Sipil (OMS)

- Grafik 2.2 menunjukkan bahwa pelibatan masyarakat oleh Organisasi Masyarakat Sipil lebih banyak dalam hal perencanaan, pelaksanaan, dan berbagi pengetahuan. Pada umumnya, pertemuan-pertemuan terkait penilaian risiko diadakan dalam jumlah terbatas.
- Pada penguatan kapasitas, cukup banyak pula responden yang menyatakan belum cukup banyak organisasi masyarakat sipil yang mengurangi hambatan agar masyarakat dapat membangun ketangguhan. Beberapa faktor yang mempengaruhinya antara lain lemahnya kebijakan dan minimnya anggaran untuk mengurangi hambatan misalnya dengan menyediakan akomodasi yang layak seperti transportasi tambahan untuk disabilitas agar bisa datang ke lokasi pertemuan atau dukungan pendamping/*caregiver*, menyediakan Bahasa isyarat, atau dukungan lain untuk mengakses lokasi pertemuan dengan mudah, dsb.
- Grafik 2.2 juga menunjukkan kekuatan organisasi masyarakat sipil dalam hal advokasi prioritas komunitas dalam platform atau forum terkait PRB. Hal ini perlu terus diperkuat sehingga suara masyarakat dan realitas lokal dapat tercermin dalam kebijakan maupun program-program yang disusun di tingkat daerah, nasional bahkan internasional.

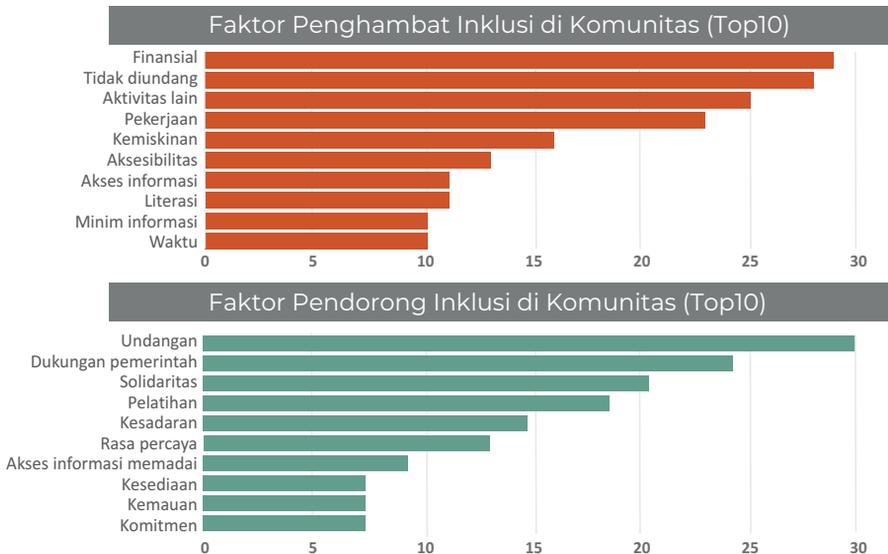
C. Lingkungan Pendukung



Grafik 3.1 Lingkungan Pendukung

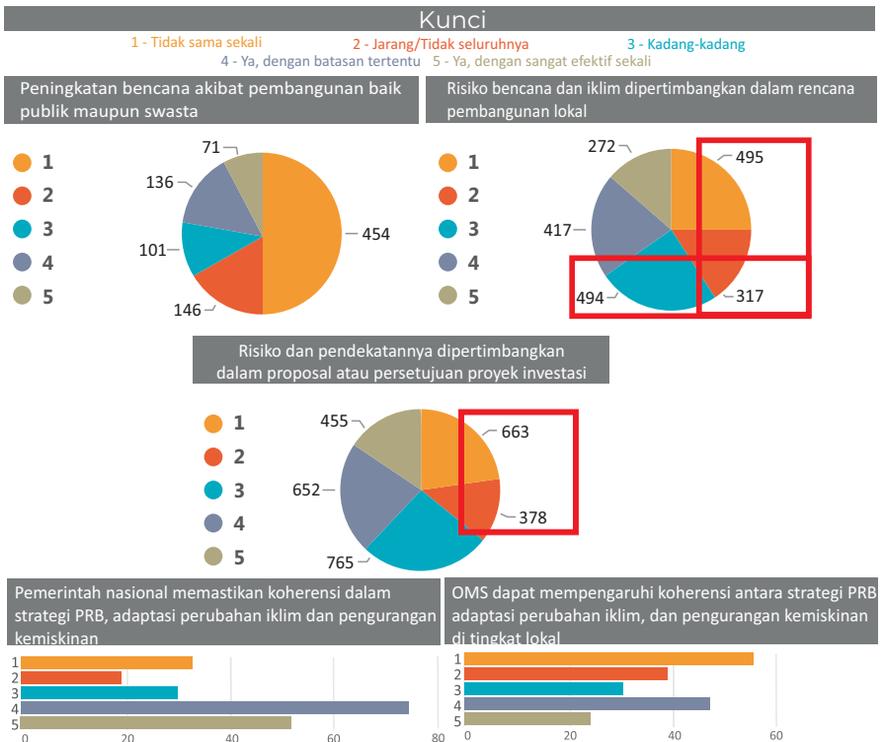
- Aspek lingkungan pendukung meliputi struktur organisasi, kebijakan, mekanisme, sumber daya, dan aksesnya. Grafik 3.1 menunjukkan bahwa struktur dan kebijakan untuk pengurangan risiko bencana sudah cukup memadai. Namun, masih diperlukan penguatan mekanisme bagi masyarakat untuk dapat berpartisipasi aktif dalam membangun ketangguhan dan sumber daya atau anggaran pemerintah yang spesifik untuk pengurangan risiko bencana di wilayah setempat.
- Meski demikian, mayoritas responden komunitas menyatakan ada peluang bagi komunitas mengakses sumber daya dari pemerintah setempat. Di sisi lain, setidaknya 46% responden menyatakan akses informasi terkait pengurangan risiko bencana belum memadai. Mekanisme partisipasi yang kurang memadai bisa membuat akses informasi juga menjadi minim. Kondisi ini juga dapat terjadi sebaliknya, akses informasi yang minim membuat masyarakat kurang familiar dengan mekanisme formal untuk mereka berpartisipasi dalam membangun ketangguhan.

"Banjir yang terjadi setiap tahun menyebabkan erosi sehingga lahan pertanian di Bitunggawa semakin mengecil. Penanaman pohon adalah salah satu upaya yang dilakukan warga untuk mengurangi dampak erosi. Yang lain dengan membangun bronjong di seberang sungai namun keterbatasan dana masih menjadi kendala"
 salah satu responden di Desa Done - Sikka, Nusa Tenggara Timur Indonesia



Grafik 3.2 Faktor yang Mencegah dan Mendorong Inklusi dalam PRB

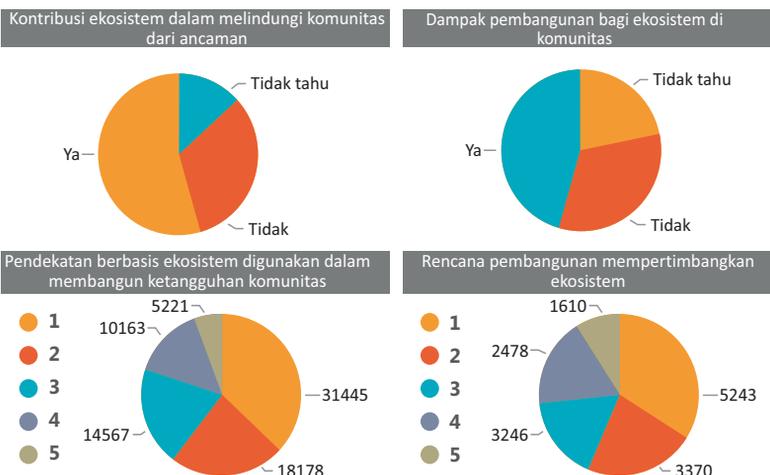
- Grafik 3.2 menunjukkan faktor-faktor yang menghambat partisipasi masyarakat antara lain terkait dengan biaya, undangan, jadwal yang bersamaan dengan pekerjaan maupun aktivitas lain, kemiskinan, dan aksesibilitas. Temuan VFL menyoroti hubungan antara PRB, aksi iklim dan isu-isu pembangunan berkelanjutan seperti kemiskinan dan ketidaksetaraan baik sebagai faktor pendorong (*driver*) dan konsekuensi dari bencana. Strategi adaptif diperlukan untuk mengatasi masalah multidimensi tersebut, yaitu tindakan inovatif yang mempertimbangkan aspek bencana dan perubahan iklim serta pemberdayaan mata pencaharian masyarakat. Memastikan kelompok miskin atau terpinggirkan mengikuti pertemuan dengan menyediakan dukungan yang memadai penting dilakukan sehingga kebutuhan dan pengalaman mereka dapat dipertimbangkan dalam penyusunan program atau kegiatan terkait dengan pengurangan risiko bencana.
- Sementara itu, solidaritas, kesadaran, rasa saling percaya (*trust*) menjadi faktor-faktor yang mendorong masyarakat untuk terlibat dalam kegiatan/pertemuan terkait pengurangan risiko bencana.



Grafik 3.3 Koherensi PRB dengan Prioritas Pembangunan

"Sebagian besar survei (VFL) mungkin dilakukan di daerah di mana pembangunan dilakukan. Yang sering terlewatkan adalah risiko di lokasi yang bukan kawasan pembangunan. Membangun di satu tempat membawa dampak di tempat lain. Pembangunan berisiko tidak hanya di lokasi pembangunan, tetapi di lokasi lain lokasi yang ditinggalkan."
Musriadi - IPPMI DPD DIY (Organisasi Mitra)

- Grafik 3.3 menunjukkan 41% responden menganggap risiko bencana dan informasi iklim belum secara konsisten dipertimbangkan dalam rencana pembangunan. Data ini menunjukkan perlu dilakukan upaya-upaya yang lebih konsisten untuk memastikan pembangunan di wilayah setempat (kelurahan/desa) memanfaatkan data dan informasi risiko dan iklim sebagai basis perencanaan sehingga mampu mengurangi risiko akibat bencana maupun perubahan iklim di kemudian hari, begitu pula dalam memastikan proyek-proyek investasi terkait pembangunan di wilayah setempat.



Grafik 3.4 Peran Ekosistem dalam Membangun Ketangguhan Masyarakat

- Grafik 3.4 menunjukkan mayoritas responden sepekat bahwa ekosistem berkontribusi dalam melindungi komunitas terhadap ancaman bencana. Hal ini memperkuat temuan pada prioritas aksi dimana komunitas menyebutkan reboisasi, pengelolaan dan perbaikan lingkungan menjadi salah satu aksi yang perlu dilakukan untuk mengurangi risiko bencana.
- Meski demikian, ekosistem terdampak cukup besar oleh pembangunan dan upaya untuk menggunakan pendekatan berbasis ekosistem dalam membangun ketangguhan maupun dalam menyusun rencana pembangunan masih belum cukup konsisten dilakukan.

D. Aspek Inklusi dalam Pelaksanaan VFL 2019

VFL 2019 berfokus pada upaya peningkatan partisipasi kelompok berisiko dalam manajemen risiko dan proses pembangunan ketangguhan. Dari serangkaian kegiatan VFL 2019 yang diikuti oleh laki-laki, perempuan, lansia, disabilitas dan anak-anak dan remaja, dua isu yang paling kerap muncul adalah (i) minimnya keterlibatan aktor lokal yang berisiko dalam proses pengambilan keputusan untuk mengakses sumber daya dan memperkuat ketangguhan dan (ii) perencanaan pembangunan daerah tidak selalu mempertimbangkan penilaian risiko bencana. Oleh karena itu, meningkatkan aksesibilitas dan inklusi kelompok paling berisiko dalam proses pengambilan keputusan terkait PRB di tingkat lokal dan memperkuat kolaborasi organisasi masyarakat sipil untuk mengangkat suara komunitas semakin urgen untuk dilakukan sehingga para pengambil keputusan dapat memahami prioritas bencana dari perspektif lokal dan proses pengambilan keputusan berbasis data dan informasi risiko yang memadai.

Pertimbangan inklusi pada setiap tahapan kegiatan VFL ditunjukkan melalui pelibatan kelompok paling berisiko baik gender maupun usia. Pada awal survei, semua pemangku VFL 2019 sepakat bahwa kelompok berisiko harus dilibatkan di setiap lokasi. Di beberapa komunitas, mereka yang paling berisiko telah terorganisir dalam kelompok berbasis komunitas (perempuan, pemuda, anak-anak, lansia). Namun, tidak demikian dengan disabilitas. Di beberapa komunitas, kesulitan menjangkau disabilitas kerap dialami organisasi-organisasi mitra VFL 2019. Stigma dari luar terhadap disabilitas dan dari dalam diri penyandang disabilitas masih kental di beberapa komunitas. Disabilitas mental dan psikososial serta orang dengan HIV/AIDS perlu diperhatikan dalam pengurangan risiko bencana. Di beberapa komunitas, upaya untuk mengatasi masalah ini dilakukan dengan melibatkan masyarakat secara bertahap, metode FGD dilakukan untuk setiap kelompok risiko yang berbeda (perempuan, laki-laki, anak-anak dan remaja, disabilitas, dan lansia) dan khusus untuk penyandang disabilitas dan lansia, alat bantu atau pendamping serta pemilihan lokasi kegiatan selalu dipertimbangkan untuk memudahkan aksesibilitas dan kenyamanan partisipan.

Temuan dari survei menunjukkan bahwa bencana memiliki konsekuensi berat bagi sebagian besar orang yang berisiko termasuk perempuan, anak-anak, dan penyandang disabilitas. Kerugian bencana meningkat dalam 5-10 tahun terakhir bagi lansia perempuan. Penyebaran informasi risiko menjadi salah satu yang perlu ditingkatkan.

46% responden menyatakan bahwa komunitas tidak menerima informasi risiko yang sesuai. Informasi risiko ini penting untuk membangun kapasitas masyarakat tentang bagaimana masyarakat bereaksi ketika terjadi bencana. Sarana dan akomodasi yang memadai juga diperlukan untuk mendukung partisipasi disabilitas, lansia dan perempuan untuk setiap program pengurangan risiko bencana termasuk aksesibilitas informasi risiko.

Di beberapa komunitas, rencana aksi lokal disusun dengan menekankan partisipasi anak-anak, misalnya seperti keterlibatan anak-anak dan remaja dalam kegiatan penanaman pohon di Wolorega, sosialisasi program kesiapsiagaan bencana di lingkungan sekolah, serta sosialisasi kesiapsiagaan berbasis keluarga di Wukirsari. Meskipun sulit untuk melaksanakan semua kegiatan akibat pembatasan COVID-19, keterlibatan anak-anak dan remaja dilakukan dengan beberapa modifikasi guna memastikan protokol Kesehatan tetap dilakukan dan keamanan peserta yang terlibat. Partisipasi perempuan dan pemuda juga tercatat di komunitas Hative Besar dimana kegiatan penghijauan di daerah aliran sungai serta program peningkatan kesadaran melalui kegiatan pendidikan dilakukan dengan tujuan untuk mengurangi kerugian bencana akibat ancaman banjir, longsor dan erosi pantai di masa depan.

E. Aspek Akuntabilitas dalam Pelaksanaan VFL 2019

Berbagai metode dilakukan untuk memastikan akuntabilitas terhadap komunitas yang menjadi target pelaksanaan VFL 2019. Pada tahap persiapan, sosialisasi program VFL 2019 dan orientasi kebijakan Safeguarding dilakukan kepada para organisasi mitra. Setiap organisasi menandatangani kebijakan Safeguarding sebagai komitmen untuk menjamin akuntabilitas pelaksanaan VFL 2019.

Sebelum melakukan survei, organisasi mitra VFL 2019 berkoordinasi dengan pemerintah di wilayah setempat. Organisasi mitra juga mempresentasikan hasil survei kepada masyarakat melalui lokakarya perencanaan aksi komunitas di mana masyarakat dapat memvalidasi hasil survei. Organisasi mitra bekerja sama dengan tokoh masyarakat dan kelompok berbasis masyarakat seperti karang taruna, kelompok perempuan, kelompok berbasis agama, dan sebagainya untuk memahami kondisi wilayah setempat dan untuk memastikan proses dan komitmen untuk mendukung komunitas terbuka menyampaikan masukan, mendengarkan dan bertindak berdasar kebutuhan dan umpan balik dari komunitas. Di beberapa lokasi, koordinasi antara perwakilan komunitas dan organisasi mitra dilakukan

setiap dua minggu sekali.

Pada awal kegiatan, organisasi mitra juga melakukan pengenalan program dan organisasinya seperti nomor telepon dan narahubung dan program, kebijakan perlindungan dan kode etik Lembaga. Sebagian besar organisasi mitra menggunakan saluran informal seperti forum diskusi dan komunikasi langsung dengan staf lapangan untuk mendengarkan keluhan atau menerima laporan yang, meskipun tidak terbatas pada ruang lingkup di atas (*mismanagement, misconduct* dan/atau eksploitasi atau pelecehan seksual), dapat dianggap sebagai tindakan melawan hukum. Jika ada indikasi bahwa laporan yang diberikan memiliki kebenaran yang lengkap dan tidak ambigu, laporan tersebut akan diteruskan ke pihak terkait. Di beberapa komunitas, mereka menggunakan sms, whatsapp maupun platform digital lainnya untuk menyebarkan informasi dan berkomunikasi dan mendiskusikan masalah aktivitas dan juga masalah lain yang relevan.

Dari pelaksanaan VFL 2019, referensi yang sama terkait kode etik dan mekanisme umpan balik dan penanganan pengaduan penting untuk dimiliki semua aktor yang terlibat. Pembelajaran VFL 2019 menunjukkan bahwa mekanisme umpan balik berjenjang dapat menjadi sarana untuk meningkatkan partisipasi dan rasa kepemilikan masyarakat terhadap proses dan kegiatan yang diusulkan melalui proses VFL. Selain itu, pemantauan dan evaluasi bersama antara aktor yang terlibat dalam pelaksanaan VFL dipandang sebagai cara yang efektif untuk berbagi informasi dan pembelajaran tentang pelaksanaan program.

2.2

Aksi VFL 2019

Kesimpulan VFL 2019 menjadi dasar perencanaan aksi lokal yang dilaksanakan di 21 komunitas. Lokakarya perencanaan aksi lokal menghasilkan 40 aksi prioritas masyarakat yang didukung oleh pendanaan dari GNDR antara lain reboisasi dan penanaman lebih dari 6075 pohon lokal, pembuatan lubang resapan biopori, pembuatan rorak atau jebakan air, pembuatan terasering guludan, dan biochar. Selain itu, rencana aksi juga memuat kegiatan-kegiatan terkait peningkatan kesadaran dan pendidikan penanggulangan bencana, kampanye PRB dan konservasi lingkungan bekerjasama dengan kelompok teater, kesiapsiagaan bencana berbasis sekolah dan keluarga, serta membangun desa tangguh melalui penguatan forum PRB desa, pemutakhiran pemetaan risiko dan peta evakuasi, penyediaan papan informasi prioritas ancaman, dan penyusunan peraturan desa untuk

pelestarian lingkungan. Di Nusa Tenggara Timur, mitra lokal bekerja bersama dengan jaringan *Partners for Resilience* dan Forum PRB setempat untuk advokasi pengelolaan risiko terpadu khususnya di daerah aliran sungai.

Sementara di tingkat nasional dan global, diseminasi pesan-pesan kunci VFL 2019 dilakukan antara lain dengan memasukan hasil VFL 2019 dalam laporan Indonesia untuk *Global Platform for Disaster Risk Reduction 2019*, sesi-sesi tematik pada Peringatan Bulan PRB 2019 dan 2020. Pada laporan negara untuk GPDRR 2019 disebutkan bahwa survei VFL 2019 menunjukkan bahwa komunitas mampu mengakses sumber daya, salah satunya melalui dana desa terutama untuk mitigasi skala kecil dan pengelolaan daerah aliran sungai. Rencana advokasi di tingkat nasional disusun berdasarkan konsultasi dengan Komite Penasihat Nasional dan pemangku kepentingan terkait untuk memperkuat kolaborasi di antara organisasi masyarakat sipil untuk menyuarakan perspektif komunitas yang paling berisiko dalam rangka memajukan PRB di Indonesia.

A. Aksi di Tingkat Lokal

Sebagai tindak lanjut dari pengumpulan data dan analisis survei, lokakarya Perencanaan Aksi komunitas diselenggarakan di 21 komunitas oleh 8 Organisasi Mitra. Lokakarya ini bertujuan untuk mempresentasikan dan memvalidasi temuan VFL 2019 dengan masyarakat, menggali informasi lebih mendalam dari berbagai pemangku kepentingan tentang prioritas ancaman dan manajemen risiko, serta merumuskan rencana aksi untuk diimplementasikan melalui kolaborasi antara pemerintah, organisasi masyarakat sipil, dan masyarakat dengan pelibatan perempuan, lanjut usia, disabilitas, anak dan remaja. Secara keseluruhan, lokakarya penyusunan rencana aksi komunitas diikuti oleh 451 orang di mana 37% adalah perempuan.

Lokakarya terdiri dari tiga agenda utama: presentasi kesimpulan VFL 2019 di tingkat komunitas oleh organisasi mitra, presentasi dari pemerintah daerah seperti Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) tentang program pemerintah tentang PRB dan tanggapan mereka atas temuan dan kesimpulan dari VFL, dan diskusi penyusunan rencana aksi komunitas.

Komunitas dapat memberikan klarifikasi dan berbagai informasi tambahan terkait temuan VFL. Di Desa Pangga Nusa Tenggara Timur misalnya, 3 ancaman prioritas antara lain tanah longsor, hujan deras, dan banjir. Salah satu peserta menyebutkan banjir tersebut bukanlah

Komunitas	Tanggal	Lokasi	Jumlah Peserta Laki-laki	Jumlah Peserta Perempuan	Total	Diorganisir oleh
Oekiu	13-08-2019	Oekiu	19	7	26	Care Peduli
Oelbiteno	13-08-2019	Oelbiteno	30	8	38	Care Peduli
Ciumbuleuit	23-08-2019	Ciumbuleuit	16	6	22	RDI
Jambudipa	23-08-2019	Jambudipa	3	12	15	RDI
Tamansari	26-08-2019	Tamansari	17	3	20	RDI
Pagerwangi	27-08-2019	Pagerwangi	2	17	19	RDI
Kedundang	05-09-2019	Balai Desa Kedundang	18	13	31	SP Kinasih
Wajur	12-09-2019	Balai Desa Wajur	14	4	18	YMP
Pangga	24-09-2019	Balai Desa Pangga	12	4	16	YMP
Sampang	10-10-2019	Balai Desa Sampang	16	11	27	Lingkar
Wolorega	15-10-2019	Wolorega	15	10	25	CKM
Korobhera	17-10-2019	Korobhera	15	10	25	CKM
Gera	18-10-2019	Gera	8	12	20	CKM
Bu Watuweti	21-10-2019	Bu Watuweti	23	2	25	CKM
Done	29-10-2019	Done	12	7	19	CKM
Kolisia B	30-10-2019	Kolisia B	12	2	14	CKM
Wukirsari	26-11-2019	Balai dusun Karangasem Pucung	12	11	23	IPPMI
Dlingo	30-11-2019	Balai dusun Pokoh 2.	15	8	23	IPPMI
Leahari	18-12-2019	Leahari	9	6	15	WP
Hukurila	19-12-2019	Hukurila	8	7	15	WP
Hative Besar	20-12-2019	Hative Besar	9	6	15	WP
Total Peserta			285	166	451	
Persentase			63%	37%	100%	

luapan air dari sungai akibat curah hujan yang tinggi, tetapi lebih karena adanya kebocoran drainase air yang menyebabkan air menggenangi tanah saat hujan. Lokakarya menjadi ruang untuk mendalami konteks dan latar belakang masyarakat yang pada kelanjutannya akan membantu komunitas memutuskan rencana aksi untuk mengurangi risiko bencana.

Meski demikian, tidak semua lokakarya dapat diikuti oleh pemerintah dari tingkat Kabupaten atau Provinsi. Konsultasi dengan melibatkan lintas pihak dari berbagai level memungkinkan adanya pertukaran perspektif dan pengakuan bahwa masyarakat dan pemerintah mungkin melihat risiko dengan cara yang berbeda, tetapi yang penting adalah adanya dialog sehingga prioritas aksi yang dirumuskan tepat sasaran. Sebagai contoh, temuan VFL di Tamansari-kelurahan padat penduduk di Kota Bandung dengan banyak gedung perkantoran, kampus, dan pemukiman-menunjukkan bahwa banjir menjadi ancaman besar bagi masyarakat. Pada dasarnya, banjir disebabkan oleh berkurangnya daerah resapan air serta pengelolaan sampah yang kurang memadai. Karena banjir sering terjadi, masyarakat seolah sudah terbiasa meski berdampak pada aktivitas sehari-hari. Data dari situs Badan Nasional Penanggulangan Bencana (inarisk.bnnpb.go.id) menunjukkan bahwa indeks kerawanan banjir di Tamansari tergolong rendah. Perbedaan hasil pemetaan yang ditampilkan di situs web dan kenyataan di lapangan dapat disebabkan oleh berbagai faktor seperti perbedaan persepsi masyarakat tentang penilaian risiko atau kurangnya data yang diperbarui dalam merancang peta yang lebih akurat. Melalui VFL 2019, masyarakat tidak hanya dapat menyampaikan prioritas mereka, tetapi di sisi lain juga dapat memberi informasi bagi masyarakat tentang standar pemerintah untuk menilai risiko. Masyarakat dapat mengetahui kebijakan dan rencana aksi PRB pemerintah terkait PRB.

Sebagian besar organisasi mitra menyebut diskusi penyusunan rencana aksi memakan waktu lebih lama dibandingkan sesi-sesi yang lainnya dalam lokakarya ini. Umumnya, diskusi dilakukan langsung di forum, namun di beberapa komunitas peserta dibagi menjadi kelompok-kelompok kecil yang terdiri dari 3-5 orang sehingga mereka dapat lebih leluasa menyampaikan pendapat. Caritas Maumere menggunakan "pohon masalah" untuk membantu mengidentifikasi akar permasalahan, menyepakati prioritas aksi untuk menjawab kesimpulan VFL. Sementara itu, Resilience Development Initiative menggunakan metode voting dimana setiap kelompok kecil akan mengusulkan dan mempresentasikan aksi-aksi komunitas. Setiap peserta berhak memilih aksi yang diusulkan dengan cara menempelkan stiker di aksi yang

mereka pilih. Hal ini untuk membantu masyarakat mengidentifikasi kegiatan mana yang mendesak, penting, dan dapat dilakukan yang akan diprioritaskan dalam rencana aksi masyarakat.

Rencana Aksi Komunitas tidak hanya terdiri dari prioritas aksi, namun juga penanggung jawab, kerangka waktu dan sumber anggaran. Selain pendanaan dari GNDR dan/atau pendanaan bersama dari organisasi mitra, kegiatan yang berpotensi didanai oleh dana desa atau sumber lain juga diidentifikasi selama lokakarya antara lain seperti pembangunan waduk di Wukirsari DIY, sumur injeksi di Oekiu dan Oelbiteno Nusa Tenggara Timur, pelatihan kesiapsiagaan bencana di Tamansari Jawa Barat, penyusunan peraturan desa tentang konservasi sumber air di beberapa desa di Nusa Tenggara Timur, dan lainnya. Namun, aksi-aksi ini urung diimplementasikan pada 2020 mengingat anggaran diprioritaskan untuk merespons COVID-19. Pelaksanaan rencana aksi pun ditunda hingga situasi lebih kondusif.

Salah satu tantangan dalam memfasilitasi lokakarya perencanaan aksi lokal adalah meminimalkan dominasi opini oleh peserta yang vokal. Hal ini kemungkinan besar terjadi karena perbedaan kapasitas dan pengetahuan tentang pengurangan risiko bencana. Salah satu anggota kelompok tani di Oelbiteno Nusa Tenggara Timur menyatakan bahwa lansia, penyandang disabilitas, dan anak muda seringkali tidak memiliki kesempatan untuk berpartisipasi. Kurangnya akses ke informasi, pengetahuan dan pengembangan keterampilan membuat mereka lebih rentan.

Aksi Komunitas di Jawa Barat



Penanaman pohon melibatkan karang taruna Kampung Nyalindung Ciumbuleuit

Kesimpulan VFL

1. Tanah longsor merupakan ancaman utama bagi komunitas Ciumbuleuit.
2. Pembuangan limbah yang tidak tepat dan kriminalitas juga menjadi ancaman yang diidentifikasi oleh komunitas.
3. Tiga hambatan utama bagi masyarakat dan pemangku kepentingan untuk mengurangi risiko antara lain minimnya sumber daya, kesadaran dan pendidikan, serta koordinasi.
4. Keterlibatan masyarakat masih minim di berbagai fase pengurangan risiko.
5. Akses sumber daya dan informasi untuk mengatasi ancaman masih belum memadai.

Aksi yang dilakukan : **Penanaman 50 Pohon Mahoni di daerah rawan longsor.**

Kondisi pandemi COVID-19 membuat RDI tidak dapat melaksanakan rencana awal yang dibuat tahun 2019, yaitu untuk mengadakan sosialisasi secara tatap muka dan melaksanakan penanaman pohon dalam skala besar dengan berbagai pemangku kepentingan kebencanaan di Kota Bandung. Meski demikian, kegiatan penanaman pohon tetap dapat dilakukan di Kampung Nyalindung, Ciumbuleuit pada tanggal 2 Juli 2021 dan diikuti 8 orang terdiri dari warga Ciumbuleuit, Perangkat Kelurahan, Dinas Pertamanan dengan tetap menerapkan protokol kesehatan. Sekitar 50 bibit pohon mahoni yang disediakan oleh Dinas Pertamanan Kota Bandung ditanam di tiga titik dengan berisiko tinggi. RDI terus bekerjasama dengan komunitas Ciumbuleuit, pemerintah kota serta organisasi masyarakat sipil lainnya yang bekerja di masyarakat untuk memperluas areal penanaman pohon dengan beragam jenis tanaman yang telah terbukti mengurangi risiko longsor.



Edukasi pengelolaan dan pengolahan sampah rumah tangga melalui video di Komunitas Tamansari berkolaborasi dengan Greeneration Foundation dan DLHK Kota Bandung

Kesimpulan VFL

1. Ancaman prioritas di Tamansari meliputi banjir, gempa bumi dan kebakaran.
2. Pendidikan dan pelatihan untuk peningkatan kesadaran, pengorganisasian masyarakat dan aksi tanggap bencana menjadi 3 prioritas aksi untuk mengatasi dan mengurangi risiko di masyarakat.
3. Dari perspektif OMS, kerugian bencana telah meningkat sedikit dalam 5-10 tahun terakhir di masyarakat.
4. Banjir dan gempa bumi menjadi ancaman paling signifikan yang mungkin akan dialami oleh generasi mendatang di Tamansari.
5. Keterlibatan masyarakat untuk penilaian risiko masih belum dilakukan secara konsisten.

Aksi yang dilakukan : **Pengelolaan dan Pengolahan Sampah Rumah Tangga melalui video edukasi.**

Dengan adanya pembatasan akibat COVID-19, RDI bersama komunitas Tamansari mengadakan kegiatan penguatan kapasitas melalui video edukasi pengelolaan sampah di tingkat rumah tangga-bekerja sama dengan Greeneration Foundation dan Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandung pada 10 Juli 2021. Sepuluh warga Tamansari dan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) terlibat dalam proses pembuatan video. Pesan utama yang ingin disampaikan dari video edukasi ini adalah mengajak masyarakat khususnya masyarakat Kelurahan Tamansari supaya peduli terhadap sampah yang dihasilkan untuk tidak membuangnya begitu saja

sehingga berdampak besar pada lingkungan seperti banjir, namun bisa diolah dan menghasilkan nilai ekonomis misalnya sampah menjadi pupuk kompos, produk daur ulang (meja, kursi, dsb) sesuai dengan slogan "Dulu sampah sekarang rupiah, dulu sampah menjijikan sekarang menjanjikan. Dulu sampah membahayakan sekarang membahagiakan. Lebih baik hidup dari sampah daripada hidup jadi sampah." Meski hanya sebagian kecil masyarakat yang bisa bergabung dalam proses pembuatan video, video berdurasi 28 menit ini menjangkau masyarakat luas bahkan di luar komunitas Tamansari. Video edukasi dipublikasikan di kanal Youtube pada 22 Juli 2021 (<https://youtu.be/OdswwBypQrg>) dan disebarluaskan melalui *whatsapp group* komunitas.



Karang Taruna Jambudipa terlibat dalam proses pembuatan video edukasi

Kesimpulan VFL

1. Gempa bumi menjadi ancaman utama bagi masyarakat Jambudipa, dan kemungkinan paling signifikan dihadapi generasi mendatang.
2. Bagi masyarakat, selain kerusakan bangunan, dampak kesehatan dan psikologi merupakan konsekuensi dari ancaman yang mereka alami.
3. Perspektif yang berbeda antara masyarakat dan pemerintah dalam hal prioritas aksi. Bagi komunitas, penting untuk membangun kesadaran akan ancaman baik untuk masyarakat maupun pemangku kebijakan di wilayah setempat, sementara bagi pemerintah, investasi penguatan infrastruktur dan upaya mitigasi menjadi prioritas yang perlu dilakukan.
4. Akses sumber daya dan informasi mengenai aksi PRB belum memadai.

Aksi yang dilakukan : **Sosialisasi mitigasi bencana gempabumi melalui video edukasi.**

Bencana gempa 2011 meninggalkan pembelajaran besar bagi warga Jambudipa. Desa ini terletak di dekat sesar lembang yang memiliki potensi ancaman gempa bumi. Untuk itu, sosialisasi dan peningkatan kesiapsiagaan gempa bumi penting dilakukan secara rutin. Namun, dengan adanya COVID-19 sosialisasi tidak dapat dilakukan secara luas dan tatap muka. Video ini diharapkan dapat menjadi materi sosialisasi yang efektif dan mudah untuk disebarluaskan di antara masyarakat. Proses pembuatan video dilakukan pada 19 Juni 2021 diikuti oleh 15 orang dari perwakilan pemerintah desa dan karang taruna. Video edukasi ini dipublikasikan melalui *Youtube* (<https://youtu.be/mVKe14ld2ws>) dan grup *whatsapp* karang taruna dan komunitas Jambudipa. Hingga 3 Agustus 2021, telah ditonton 124 kali di *Youtube*.



Persiapan pengambilan gambar untuk video edukasi kesiapsiagaan bencana bersama Komunitas Pagerwangi

Kesimpulan VFL

1. Ancaman prioritas bagi masyarakat Pagerwangi antara lain gempa bumi, tanah longsor dan kriminalitas yang meningkat.
2. Tiga prioritas aksi meliputi investasi penguatan infrastruktur, upaya mitigasi, dan koordinasi dengan pemerintah dan para pemangku kepentingan yang efektif.
3. Kurangnya sumber daya, kesadaran dan komitmen masyarakat adalah hambatan paling signifikan yang dihadapi masyarakat untuk mengatasi ancaman.
4. Keterlibatan masyarakat oleh pemerintah dan OMS perlu ditingkatkan untuk membangun masyarakat untuk berpartisipasi dalam PRB.
5. Akses terhadap sumber daya dan informasi tentang aksi PRB masih perlu diperkuat.

Aksi yang dilakukan : **Sosialisasi mitigasi bencana gempa bumi melalui video edukasi.**

Hasil pemetaan bahaya gempa bumi menunjukkan bahwa Desa Pagerwangi termasuk dalam kategori sedang-tinggi. Sebagai daerah yang dilewati oleh sesar Lembang, Desa Pagerwangi sudah memiliki tingkat kesadaran akan bencana, namun belum secara merata akibat lokasi permukiman yang saling berjauhan. Dengan adanya penyesuaian, sosialisasi yang awalnya direncanakan tatap muka diubah menjadi video edukatif. Video animasi berdurasi 5 menit ini memuat pengetahuan terkait bagaimana gambaran potensi gempa dari sesar lembang, karakteristik Desa Pagerwangi, dan kondisi kesiapan masyarakat yang didapatkan berdasarkan survei VFL 2019. Selain itu, juga memuat pengetahuan proses mitigasi dan evakuasi kebencanaan, baik sebelum, sesaat, dan setelah bencana gempa. Proses pembuatan video dilakukan pada 20 Juni 2021 dengan melibatkan 10 warga Pagerwangi. Selanjutnya, video dipublikasikan melalui *Youtube* <https://youtu.be/W95wJ9FOlqY> hingga 3 Agustus 2021 video sudah ditayangkan 91 kali. Jumlahnya terus meningkat. Video ini bermanfaat bukan hanya bagi warga Pagerwangi, namun juga masyarakat yang tinggal di sekitar sesar Lembang maupun yang rawan gempa bumi .

Aksi Komunitas di DI Yogyakarta



Serah terima bibit pohon pada komunitas Sampang



Mendiskusikan Peta ancaman dan risiko dalam pertemuan warga



Pendalaman sumur di dusun Sidomulyo Desa Sampang

Kesimpulan VFL

1. Longsor, kekeringan, dan gempa bumi menjadi ancaman prioritas di komunitas Sampang
2. Peningkatan kesadaran PRB berbasis ekosistem perlu terus dilakukan bagi masyarakat.
3. Pendekatan ekosistem belum digunakan secara konsisten dalam membangun ketangguhan komunitas.
4. Keterlibatan masyarakat oleh organisasi masyarakat sipil telah dilakukan secara efektif baik dalam hal pelaksanaan, peningkatan kapasitas maupun berbagai pengetahuan.

Aksi yang dilakukan :

1. **Proses pemasangan rambu-rambu evakuasi.**
2. **Pemetaan daerah rawan longsor.**
3. **Pemasangan Peta Bahaya & Risiko dan Peta Evakuasi.**
4. **Penanaman 60 *Multipurpose Tree Species* (MPTS).**
5. **Pertemuan rutin Forum PRB Sampang.**
6. **Sosialisasi Rencana Penanggulangan Bencana Desa.**
7. **Pendalaman sumur.**

Forum PRB Sampang melalui dukungan teknis dari Lingkar berhasil memasang rambu-rambu evakuasi di 23 lokasi rawan longsor pada 14 Maret 2020. Rambu tersebut sudah disediakan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) sejak tahun 2019. Pemasangan dilakukan setelah pelatihan dapur umum bagi seluruh anggota FPRB Sampang untuk meningkatkan kapasitas forum dalam penyediaan makanan pada saat darurat.

Setelah jeda yang cukup panjang akibat Covid-19, FPRB Sampang dapat menyelenggarakan tiga kali pertemuan. Pertemuan pertama diselenggarakan pada 27 April 2021 yang diikuti oleh 18 anggota FPRB (14 laki-laki, 4 perempuan) untuk menyampaikan kembali temuan VFL, memperbarui dokumen risiko bencana desa dan melaporkan bahwa semua rambu evakuasi telah

dipasang. Pertemuan rutin juga diadakan pada 28 April 2021, diikuti oleh 17 orang (13 laki-laki, 4 perempuan) untuk melanjutkan pembaruan penilaian risiko bencana dan kapasitas di masyarakat. Pertemuan ketiga pada tanggal 29 April 2021 yang diikuti oleh 16 orang (13 laki-laki, 3 perempuan) diadakan untuk memetakan daerah rawan longsor. Hasilnya berupa Peta ancaman, risiko dan evakuasi yang kemudian dipasang di kantor desa.

Pada 30 April 2021, FPRB Sampang mengadakan sosialisasi kesiapsiagaan bencana untuk mitigasi kekeringan di mana mereka juga membahas persiapan penanaman pohon. Pertemuan diikuti 17 orang (13 laki-laki, 4 perempuan). Keenam dusun di desa ini berada di daerah rawan longsor, meskipun daerah lereng yang ekstrim jauh dari pemukiman masyarakat. Komunitas sepakat untuk mengajukan proposal ke Balai Pengelolaan DAS Serayu Opak untuk pengadaan rumput vetiver untuk ditanam di lereng ekstrim tersebut. Proposal telah diajukan pada Agustus 2021.

Sebagai tindak lanjut dari sosialisasi tersebut, masyarakat melakukan penanaman pohon pada tanggal 1 Mei 2021 yang diikuti oleh 18 orang (14 laki-laki, 4 perempuan). Komunitas Sampang menanam jenis MPTS (pohon buah-buahan) yang sesuai dengan kondisi tanah, memiliki nilai ekonomi yang tinggi, cepat dan mudah dipanen tanpa harus menebang pohon serta mampu menjaga lingkungan dan mata air. Pohon yang ditanam berjumlah 60 terdiri dari alpukat kendil (30 anakan), lengkung matalada (14 anakan), lengkung kristal (2 anakan) dan lengkung pingpong (14 anakan). Penanaman pohon diharapkan dapat mengurangi risiko bencana di masa depan sekaligus memiliki nilai ekonomi yang tinggi.

Sosialisasi Rencana Penanggulangan Bencana Desa diselenggarakan oleh FPRB Sampang pada tanggal 6 Oktober 2021, diikuti oleh 44 anggota masyarakat (34 laki-laki, 10 perempuan). Selain menyampaikan peta ancaman, risiko, dan evakuasi, dalam kesempatan ini komunitas juga sepakat untuk melakukan aksi antisipasi bencana dengan melakukan kerja bakti setiap hari Minggu, membersihkan saluran air dan gotong royong, memotong ranting-ranting pohon yang berbahaya sehingga tidak menimpa rumah ketika terjadi angin kencang.

Hasil penilaian risiko di Sampang mengkategorikan kekeringan sebagai risiko "sedang". Namun, 5 dari 6 dusun masih mengalami kekeringan setiap tahunnya dan semakin parah saat musim kemarau. Pada pertemuan, komunitas mengusulkan pendalaman air sumur di Dusun Sidomulyo. Kegiatan ini merupakan penambahan dari rencana aksi komunitas yang disusun pada 2019 yang lalu. Dengan adanya pandemi COVID-19, kebutuhan air di komunitas semakin meningkat. Pendalaman sumur menjadi prioritas agar suplai air dapat meningkat untuk 57 KK dari 2 RT. Biasanya, warga membeli 10 tangki air (Rp. 250.000/tangki) terutama pada puncak musim kemarau. Pendalaman sumur berhasil meningkatkan debit air dari sebelumnya 5000 liter menjadi 7500 liter per hari. Komunitas juga tidak perlu membeli air lagi.

FPRB Sampang juga rutin berpartisipasi dalam proses perencanaan pembangunan desa (Musrenbangdes).



Sosialisasi PRB berbasis ekosistem

Kesimpulan VFL Kedundang Kab. Kulon Progo:

1. Bagi pemerintah setempat, ancaman sosial menjadi salah satu prioritas ancaman di wilayah.
2. Perubahan pola curah hujan telah mempengaruhi mata pencaharian masyarakat.
3. Pelibatan masyarakat dalam penilaian, perencanaan, dan pelaksanaan program untuk mengatasi ancaman di wilayah masih minim.
4. Peningkatan kesadaran akan PRB berbasis ekosistem perlu terus diperkuat di komunitas.

Aksi yang dilakukan :

- 1. Sosialisasi Pengurangan Resiko Bencana Berbasis Ekosistem dan Responsif Gender.**
- 2. Refleksi Tim Siaga Desa Kedundang.**

Sosialisasi PRB berbasis ekosistem dan responsif gender dilakukan pada 11 November 2021 diikuti oleh 38 orang (23 laki-laki, 15 perempuan), sementara Refleksi tim Siaga Bencana di tingkat Desa dilaksanakan pada 22 Desember 2021 diikuti oleh 28 orang (24 laki-laki, 4 perempuan). Kegiatan-kegiatan menjadi wadah bagi masyarakat dengan latar belakang yang beragam (kelompok perempuan, petani, perangkat desa, pemuda, lansia) dan pemerintah (BPBD, pemerintah desa) untuk menilai, merencanakan, dan mengimplementasikan tindakan untuk mengurangi ancaman di wilayah mereka. Pada kegiatan ini, komunitas mampu mengidentifikasi dan merefleksikan kapasitas dan sumber daya (alam, manusia, sosial) yang telah mereka miliki dan apa yang perlu ditingkatkan sedangkan pemerintah dapat mengambil masukan masyarakat ketika membuat program PRB antara lain seperti penguatan kapasitas kesiapsiagaan bencana berdasarkan sektor (kesehatan, evakuasi, dapur umum, dll), pemutakhiran peta bencana, simulasi bencana yang dilakukan berkala, dan sebagainya.

Kegiatan ini juga menjadi ruang pertukaran nilai dan pengetahuan lokal dari generasi tua ke generasi yang lebih muda sehingga kearifan lokal turut membangun kesiapsiagaan masyarakat dan tidak selalu bergantung pada teknologi.

"Bencana apapun mempunyai dampak yang berbeda bagi perempuan. Dampak bencana tidaklah netral gender. Maka sangat penting melibatkan perempuan dalam setiap tahapan bencana." Sana Ulaili - SP Kinasih





Sosialisasi Kesiapsiagaan Bencana di Lingkungan Sekolah



Penanaman pohon dilakukan komunitas Wukirsari

Kesimpulan VFL Wukirsari Kab. Bantul

1. Longsor, banjir, dan angin puting beliung menjadi prioritas ancaman bagi komunitas Wukirsari.
2. Kekeringan menjadi salah satu ancaman signifikan yang mungkin dialami oleh generasi mendatang. Saat ini, kekeringan menjadi ancaman utama terutama dirasakan oleh perempuan karena berdampak pada kurangnya sumber air bersih dan lingkungan. Dari perspektif komunitas, reboisasi menjadi prioritas aksi yang perlu dilakukan untuk mendukung ketersediaan air terutama di masa depan.
3. Meningkatkan kesadaran dan pengetahuan tentang pengurangan risiko bencana berbasis ekosistem penting bagi masyarakat.
4. Kerugian akibat bencana longsor, banjir, dan angin puting beliung sedikit menurun dalam 5-10 tahun terakhir.

Aksi yang dilakukan :

- 1. Sosialisasi Kesiapsiagaan Bencana di Lingkungan Sekolah.**
- 2. Penanaman 105 pohon gayam, beringin, jati dan pembuatan biopori.**
- 3. Sosialisasi kesiapsiagaan bencana berbasis keluarga (Keluarga Siap Tanggap Tangguh - SITATANG).**

Sosialisasi kesiapsiagaan bencana di lingkungan sekolah dilaksanakan di PAUD Cerdas Ceria Dusun Jatirejo, Wukirsari pada 6 Oktober 2020. Kegiatan ini diikuti oleh 18 orang (8 laki-laki, 10 perempuan) yang mewakili pemerintah desa, orang tua, forum PRB setempat, komite dan guru sekolah. Awalnya, kegiatan ini dirancang untuk melibatkan anak-anak dalam simulasi, namun karena pandemi, hal itu tidak dilakukan. Para guru dan orangtua yang terlibat sepakat untuk membagikan pengetahuan dari sosialisasi ini pada anak-anak dan latihan simulasi ketika situasi memungkinkan. Pembicara dari BPBD Bantul menyampaikan materi tentang kesiapsiagaan bencana, kemudian bersama para peserta menentukan titik kumpul, pemasangan jalur evakuasi di lingkungan sekolah dan pembagian stiker jalur evakuasi.

Sementara itu, sosialisasi SITATANG dilaksanakan di balai desa Wukirsari pada tanggal 23 November 2020 diikuti oleh 20 orang (17 laki-laki, 3 perempuan)

melibatkan perangkat desa, tokoh masyarakat, forum PRB, dan karang taruna. Melalui kegiatan ini, peserta mengenali dan memahami potensi ancaman bencana (longsor, banjir, dan angin puting beliung) di wilayahnya, meningkatkan pengetahuan dan keterampilan bagi keluarga untuk membangun kesiapsiagaan misalnya mempersiapkan tas siaga bencana wawasan tentang struktur dan penataan ruangan yang aman, peringatan dini di lingkungan setempat dan meningkatkan peran aktif di keluarga dan masyarakat dalam rangka pengurangan risiko bencana.

Kegiatan dilanjutkan dengan sesi pengantar oleh Wahana Bhakti Pertiwi tentang pentingnya menjaga dan memelihara pohon khas untuk konservasi air dan tanah. VFL menunjukkan kekeringan menjadi salah satu ancaman signifikan yang mungkin dialami oleh generasi mendatang. Tujuh orang (5 laki-laki, 2 perempuan) terlibat dalam penanaman 80 pohon gayam dan beringin serta 25 pohon.



Sosialisasi SITATANG di Komunitas Dlingo



Serah terima bibit bambu petung

Kesimpulan VFL Dlingo, Kab. Bantul

1. Tanah longsor, gempa bumi, dan kekeringan merupakan 3 prioritas ancaman di Dlingo.
2. Perempuan dan anak-anak paling terkena dampak kekeringan.
3. Kerugian bencana di Dlingo telah meningkat sedikit bagi anak-anak dan remaja dalam 5-10 tahun terakhir.
4. Berbagi informasi tentang PRB dan meningkatkan kesadaran masyarakat akan ancaman perlu dilakukan secara konsisten di masa depan oleh pemerintah daerah dengan melibatkan pihak lain.

Aksi yang dilakukan :

1. **Penanaman 160 pohon bambu petung di kawasan Sungai Oya.**
2. **Sosialisasi Keluarga Siap Tanggap Tangguh - SITATANG dan Hutan Negara.**
3. **Pertunjukan Seni untuk meningkatkan kesadaran akan pelestarian lingkungan oleh kelompok teater desa.**

Penanaman pohon bambu petung di desa Dlingo diawali sarasehan budidaya tanaman untuk penataan kawasan sungai Oya.



Pembuatan lubang biopori untuk resapan air

Kegiatan ini dilaksanakan pada 23 November 2020 diikuti oleh 23 orang (21 laki-laki, 2 perempuan) terdiri dari perangkat desa, tokoh masyarakat, forum PRB, kelompok pemuda dan beberapa anggota masyarakat yang memiliki tanah di sekitar bantaran sungai Oya. IPPMI mendistribusikan 160 bibit pohon bambu dan dua set biopori untuk masyarakat. Melalui kegiatan ini, pengetahuan komunitas tentang manfaat bambu untuk mitigasi longsor dan perlindungan mata air semakin meningkat. Pembuatan biopori juga dilakukan untuk membantu tanah menyerap air ketika hujan sehingga cadangan air semakin banyak.

Untukantisipasi penyebaran COVID-19, sosialisasi kesiapsiagaan bencana berbasis keluarga (SITATANG) dilakukan sebanyak dua kali dengan total jumlah peserta 43 orang (32 laki-laki, 11 perempuan). Sosialisasi pertama dilaksanakan di Balai Dusun Pokoh 2 pada 8 Oktober 2020, sementara sosialisasi kedua dilakukan di Dusun Kebosungu 2 pada 20 Oktober 2020. Selain sosialisasi keluarga SITATANG, peserta juga diberikan pemahaman tentang pengelolaan hutan negara mengingat sebagian besar wilayah Dlingo masuk kawasan hutan negara. Pengelolaan hutan negara terkait erat dengan masalah kebencanaan. Kegiatan penyadartahuan perlindungan lingkungan dilakukan berkolaborasi dengan Kelompok Teater "Alang-alang" Dusun Pokoh 2 Desa Dlingo. Pada 14 November 2021, IPPMI bersama kelompok teater yang anggotanya sebagian besar anak muda, membuat video Merti Kali Sendang. Selain merekam upacara, pertunjukan seni dan cerita, video tersebut juga meningkatkan kesadaran akan perlindungan pohon sawo yang banyak ditemukan di Dlingo dan mempromosikan produk olahannya. Proses pembuatan video ini diikuti oleh 32 orang (29 laki-laki, 3 perempuan). Video tersebut dipublikasikan melalui youtube (<https://www.youtube.com/watch?v=By2XLuFimz8>) dan grup whatsapp komunitas. Video ini menjadi media berbagi informasi, mendiseminasikan pengetahuan lokal, dan meningkatkan kesadaran masyarakat untuk mengurangi risiko bencana.

"Jenis bencana yang bisa terjadi di Dlingo; seperti bencana akibat gempa bumi, tanah longsor, dan kekeringan. Melihat fenomena alam yang semakin tidak menentu, masyarakat Dlingo membentuk "Teater Alang-Alang" yang bercerita tentang kekeringan dengan judul "Jumbleng" agar masyarakat lebih melestarikan alam, menanam pohon, dan membuat biopori untuk resapan air hujan. Beberapa tahun ini kita melihat sebagian besar air hujan hanya mengalir ke sungai kemudian ke laut (tidak terserap ke dalam tanah). Sumber air menghilang dan banyak tempat dilanda kekeringan pada musim kemarau." Haryono, Dlingo - Yogyakarta



Aksi Komunitas di Maluku



Penanaman serentak di pesisir Pantai



Penanaman serentak di pesisir Pantai

Kesimpulan VFL Leahari, Kota Ambon

1. Banjir, kebakaran lahan, dan erosi merupakan tiga ancaman paling signifikan di Leahari.
2. Kerugian akibat bencana sedikit meningkat dalam 5-10 tahun terakhir.
3. Bagi lansia, kenaikan permukaan air laut patut diwaspadai karena telah merusak infrastruktur dan menyebabkan hilangnya aset
4. Keterlibatan masyarakat oleh OMS telah dilakukan terutama untuk peningkatan kapasitas.
5. Peningkatan kesadaran pengurangan risiko bencana berbasis ekosistem harus dilakukan bagi masyarakat.

Aksi yang dilakukan :

Penanaman 1350 pohon di pesisir pantai dan hutan

Pada tanggal 21-22 Mei 2021 Walang Perempuan mendistribusikan 700 anakan untuk Leahari terdiri dari 200 anakan pohon mangga, 200 rambutan, 200 durian dan 100 Meranti. Namun, akibat hujan lebat dan banjir besar melanda kota Ambon, kegiatan penanaman ditunda hingga kondisi memungkinkan. Kegiatan penanaman pohon akhirnya dilaksanakan pada 6 Oktober 2021

yang diikuti oleh 40 orang (29 laki-laki, 11 perempuan) terdiri dari pemerintah Negeri, Saniri Negeri³, Kewang (Penjaga lingkungan) dan kelompok masyarakat. Selain bibit bantuan tahap pertama, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan juga memberikan bantuan tambahan berupa bibit pohon bintanggor sebanyak 200, Melinjo 100 dan cengkeh 150 anakan. YWP membeli 150 bibit pala dari petani setempat. Pohon bitanggor dipilih sebagai pengganti mangrove. Bintanggor yang tumbuh di pesisir pantai mampu menahan angin laut yang kencang, menahan abrasi pantai, juga memiliki nilai ekonomi yang tinggi. Kayu bitanggor berguna untuk bahan pembuatan perahu atau perabot rumah tangga. Kulit yang sudah direbus biasanya digunakan sebagai obat herbal bagi ibu pasca melahirkan. Sementara itu, bibit yang lain dibagikan pada komunitas Leahari untuk ditanam di lahan masing-masing sebagai upaya reboisasi, mengurangi risiko banjir dan mendukung mata pencaharian mereka.

³Saniri Negeri adalah lembaga adat yang berperan mengayomi adat istiadat dan hukum adat. Saniri berperan membantu Raja (Kepala Desa) dalam penyelenggaraan pemerintahan di Desa atau Negeri.



Kegiatan penghijauan bersama Komunitas Hukurila

Kesimpulan VFL Hukurila, Kota Ambon

1. Tanah longsor, kebakaran, dan erosi menjadi 3 ancaman prioritas utama di Hukurila.
2. Kerugian akibat bencana sedikit meningkat selama 5-10 tahun terakhir ini.
3. Keterlibatan masyarakat oleh pemerintah dalam pengkajian dan perencanaan aksi untuk mengurangi risiko belum dilakukan secara konsisten.
4. Risiko di masyarakat meningkat karena pembangunan di daerah setempat (swasta/publik)
5. Peningkatan kesadaran pengurangan risiko bencana berbasis ekosistem harus dilakukan bagi masyarakat.

Aksi yang dilakukan :

Meningkatkan kesadaran melalui kegiatan edukasi dan penghijauan.

Kegiatan edukasi dan penghijauan dilaksanakan pada tanggal 14 Oktober 2021 diikuti oleh 40 orang (27 laki-laki, 13 perempuan) antara lain petani, pemuda, perempuan, tokoh masyarakat dan pemerintah desa. Kegiatan tersebut sangat relevan dengan kebutuhan masyarakat mengingat kerugian bencana akibat tanah longsor, kebakaran hutan, dan abrasi yang cukup tinggi di masyarakat ini. Walang Perempuan mendistribusikan 150 cengkeh, 50 melinjo, 150 pala, 200 rambutan, 200 durian, 100 meranti dan 200 anakan mangga bekerjasama dengan Dinas Lingkungan Hidup dan petani setempat yang melakukan pembibitan pala. Mengingat pentingnya kegiatan penghijauan, maka Pemerintah Desa dan masyarakat berkontribusi dengan menjaga dan memelihara tanaman penghijauan. Manfaatnya belum bisa dirasakan saat ini, tetapi dengan melakukan penghijauan masyarakat telah berinvestasi untuk kelangsungan hidup generasi mendatang yang lebih baik.



Serah terima bibit untuk reboisasi

Kesimpulan VFL Hative Besar, Kota Ambon

1. Banjir, longsor, dan erosi merupakan ancaman prioritas di Hative Besar.
2. Dari perspektif perempuan, kerugian bencana meningkat secara signifikan dalam 5-10 tahun terakhir.
3. Keterlibatan masyarakat oleh OMS dan pemerintah dalam perencanaan aksi untuk mengatasi ancaman atau mengurangi risiko belum dilakukan secara konsisten.



Penanaman anakan meranti

4. Risiko dari ancaman prioritas cukup meningkat karena pembangunan lokal (publik atau swasta) yang belum mempertimbangkan PRB dan perubahan iklim seperti proyek reklamasi yang membawa dampak bagi masyarakat sekitar.
5. Pemerintah pusat memiliki strategi yang koheren tentang kemiskinan, PRB, dan perubahan iklim. OMS juga telah mempengaruhi koherensi strategi ini di tingkat lokal meskipun masih dengan keterbatasan.

Aksi yang dilakukan : **Kegiatan Reboisasi**

Pelaksanaan rencana aksi di Hative Besar sempat tertunda beberapa kali karena adanya PPKM di masa pandemi, banjir yang melanda komunitas, dan tokoh adat (*Saniri negeri*) yang meninggal dunia. Penghijauan di Negeri Hative Besar diharapkan dapat mengembalikan fungsi hutan itu sendiri untuk mengurangi dampak perubahan iklim termasuk 3 ancaman utama bagi masyarakat: banjir, tanah longsor, dan abrasi. VFL 2019 juga menemukan bahwa kerugian bencana bagi perempuan meningkat secara signifikan dalam 5-10 tahun terakhir. Perempuan sangat bergantung pada sumber daya alam terutama untuk mendukung mata pencaharian mereka. Oleh karena itu, perempuan dilibatkan secara aktif pada kegiatan reboisasi yang diadakan pada 25 Oktober 2021. Setidaknya 40 orang (29 laki-laki, 11 perempuan) terlibat dalam aksi ini mulai dari petani, kelompok perempuan, pemuda, dan tokoh desa serta melibatkan kewang negeri (penjaga lingkungan setempat). Masyarakat menanam 200 pohon bitanggor dan 100 tanjung untuk mengurangi abrasi, 150 bibit cengkeh, dan 150 bibit pala. Selain jenis pohon tersebut, distribusi pohon buah-buahan seperti 200 mangga, 200 rambutan, 200 durian, dan 100 meranti juga dilakukan untuk ditanam di lahan masyarakat untuk penghijauan.



Saniri juga berperan sebagai pelestari lingkungan dari eksploitasi

Aksi Komunitas di Nusa Tenggara Timur



*Peserta Pelatihan
Teknik Pertanian Tangguh*



Distribusi bibit sayur

Kesimpulan VFL Wajur, Kab. Manggarai Barat

1. Prioritas ancaman yang dihadapi masyarakat antara lain longsor, angin kencang, dan kekeringan.
2. Perempuan paling terdampak akibat serangan hama yang menyebabkan gagal panen, penurunan hasil panen, dan kerugian ekonomi.
3. Kerugian akibat bencana sedikit meningkat dalam 5-10 tahun terakhir baik bagi penyandang disabilitas, lanjut usia, serta pemuda dan anak-anak.
4. Dari perspektif masyarakat maupun pemerintah setempat, kurangnya kesiapsiagaan bisa menjadi ancaman paling signifikan yang mungkin dihadapi oleh generasi mendatang.
5. Keterlibatan masyarakat oleh OMS dan pemerintah untuk penilaian ancaman signifikan di masyarakat belum dilakukan secara konsisten.

Aksi yang dilakukan :

1. **Pelatihan pupuk organik dan biochar**
2. **Distribusi benih untuk pertanian tangguh**

Melalui pelatihan pertanian tangguh yang dilaksanakan pada tanggal 15 Desember 2019 yang diikuti oleh 23 orang (10 laki-laki, 13 perempuan), masyarakat memperoleh pengetahuan dan keterampilan terkait penggunaan biochar untuk memulihkan kondisi tanah, mempertahankan unsur hara, dan meningkatkan ketahanan tanaman di musim hujan atau kemarau. Hampir separuh dari peserta pelatihan telah mempraktikkan di lahan pertaniannya masing-masing. Pada pertemuan lanjutan tanggal 24 November 2021 yang diikuti oleh 28 orang (12 laki-laki, 16 perempuan), Mariamoe Peduli mengundang tenaga ahli dari wilayah setempat untuk menyegarkan pengetahuan tentang teknik pertanian yang tangguh sekaligus mendistribusikan benih sayur yang tahan terhadap kondisi kering. Beberapa warga yang telah mempraktikkan biochar mengakui sayuran yang mereka tanam berbeda dari sebelumnya. Beberapa perbedaannya seperti batang lebih besar, daun lebih lebar, tumbuh lebih banyak, tidak mudah busuk, dan rasanya lebih segar. Mereka sangat antusias dan ingin untuk meningkatkan perekonomian mereka melalui pertanian dengan teknik pertanian tangguh. Pemerintah desa menyarankan agar pelatihan yang sama dapat diadakan di daerah lain yang menghadapi tantangan yang sama dan mendorong masyarakat dari Wajur untuk menjadi narasumber. Pembelajaran ini dibagikan juga ke komunitas dan organisasi lain yang bekerja di Manggarai.



Proses pembakaran sekam untuk diolah menjadi biochar

Kesimpulan VFL Pangga, Kab. Manggarai Barat

1. Tanah longsor merupakan salah satu ancaman prioritas yang dihadapi masyarakat, selain curah hujan yang tinggi dan banjir.
2. Bagi perempuan, kekeringan merupakan ancaman utama yang mereka hadapi karena menimbulkan kerugian ekonomi, kerawanan pangan dan penurunan hasil panen.
3. Kerugian akibat bencana tetap sama dalam 5-10 tahun terakhir. Curah hujan tinggi dan tanah longsor yang meningkat diprediksi akan dialami oleh generasi mendatang.
4. Pemerintah setempat telah melibatkan perwakilan masyarakat dalam memantau kemajuan menuju ketangguhan.
5. Peningkatan kesadaran pengurangan risiko bencana berbasis ekosistem harus dilakukan bagi masyarakat.

Aksi yang dilakukan : **Pelatihan teknik pertanian tangguh**

Pelatihan dilaksanakan pada 29 November 2019 diikuti oleh 26 orang (23 laki-laki, 3 perempuan). Pelatihan tentang cara menggunakan biochar telah memperkuat pengetahuan dan pengalaman petani untuk menjaga tanah tetap subur dan beradaptasi dengan perubahan iklim. mengurangi risiko hama dan penyakit tanaman dan meningkatkan ketahanan tanaman baik di musim hujan atau kekeringan. Anggota komunitas mulai menggunakan biochar di lahannya masing-masing.



Sesi "Open Mind" dalam pelatihan pertanian yang tangguh terhadap ancaman kekeringan

Wolorega - Sikka



Keterlibatan anak-anak dalam penanaman pohon di Wolorega



Keterlibatan perempuan dalam aksi penanaman pohon

Kesimpulan VFL Wolorega, Kab. Sikka

1. Angin kencang (topan), tanah longsor dan kekeringan merupakan ancaman prioritas di masyarakat. Dari perspektif masyarakat, kekeringan merupakan ancaman utama.
2. Gagal panen menjadi konsekuensi utama dari kekeringan selain hilangnya sumber air bersih dan dampak kesehatan.
3. Kerugian akibat bencana meningkat drastis terutama bagi penyandang disabilitas, perempuan dan laki-laki. Kekeringan, angin topan, dan tanah longsor merupakan ancaman paling signifikan yang mungkin dialami oleh generasi mendatang.
4. Tidak semua warga masyarakat dapat mengakses informasi dari pemerintah terkait aksi PRB.
5. Struktur pemerintahan yang khusus ditunjuk serta anggaran khusus untuk menangani program PRB atau API belum optimal
6. Peningkatan kesadaran pelestarian ekosistem harus dilakukan di masyarakat.

Aksi yang dilakukan : Penanaman pohon dan pembuatan jebakan air.

Penanaman pohon dilakukan di sekitar 10 mata air dari total 21 mata air yang ada di Wolorega, yaitu Ae Kate, Ae Lowo Ndoko, Ae Lowo Ndoko B, Ae Rose dan Ae Nggaja di Dusun Bhana, Ae Ture dan Ae Rau di Waturesa, Ae Rongga Rangga, Loka Po'o dan Ae Habo di Dusun Rejo. Kegiatan dilaksanakan serentak pada tanggal 12 Februari 2020 dan diikuti oleh 389 warga (275 laki-laki, 114 perempuan) termasuk perangkat desa, Badan Perencanaan Desa, serta siswa SD dan SMP. Jenis pohon dipilih berdasarkan karakteristik tanah di desa ini seperti waru, ara, funga, tere, gau, dan nggaja. Kepala dusun dan tokoh masyarakat sepakat untuk menjadi penanggung jawab kegiatan penanaman pohon dan pembuatan jebakan air serta pemeliharannya di wilayah masing-masing. Pemerintah desa telah memasukkan kegiatan tersebut dalam perencanaan desa (Rencana Kerja Desa tahun berikutnya). Dengan demikian, desa dapat secara mandiri melanjutkan kegiatan pengurangan risiko bencana di wilayahnya masing-masing dengan dana desa.



Penanaman pohon dan pembuatan jebakan air oleh Komunitas Gera

Kesimpulan VFL Gera, Kab. Sikka

1. Kekeringan merupakan ancaman utama bagi masyarakat Gera.
2. Reboisasi menjadi prioritas aksi yang perlu dilakukan.
3. Struktur/divisi khusus untuk mengatasi ancaman, mekanisme untuk melibatkan masyarakat dalam pembangunan ketangguhan, dan alokasi anggaran masih perlu diperkuat.
4. Risiko bencana dan perubahan iklim belum dipertimbangkan secara konsisten dalam rencana pembangunan.
5. Ekosistem terdampak pembangunan di wilayah setempat.

Aksi yang dilakukan : Penanaman pohon dan pembuatan jebakan air

Dari 19 mata air di Gera, melalui dana VFL masyarakat dapat melakukan penghijauan di sekitar 4 mata air. Penanaman pohon dilakukan pada tanggal yang berbeda; 11 Februari 2020 di mata air Boka Niku Dusun Gera I diikuti sebanyak 32 orang (19 laki-laki, 13 perempuan), sedangkan penanaman pohon di mata air Uda Funga Gera II dan Dagemude dan Mata Air Kobaleke Gera III dilaksanakan pada tanggal 19 Februari 2020 yang diikuti oleh 41 orang (32 laki-laki, 9 perempuan) dan 44 orang (27 laki-laki, 17 perempuan). Total ada 117 orang (78 laki-laki, 39 perempuan) yang mengikuti kegiatan yang terdiri dari perempuan, pemuda, kepala desa, bahkan camat dan forum bantaran sungai Riawajo. Meski sumber mata air berada di dusun yang berbeda, namun kegiatan tersebut dapat memberikan manfaat bagi 2346 orang yang tinggal di 3 dusun (Gera I, Gera II, dan Gera III). Masyarakat memilih jenis pohon yang cocok dan mampu melindungi mata air seperti beringin, dadap, waru, dan kaju ae.

Mengingat masih ada 15 mata air lainnya di desa Gera, pemerintah desa telah merencanakan untuk memasukkan kegiatan penanaman pohon dan pembuatan jebakan air dalam rencana kerja desa pada tahun 2021. Namun karena pandemi, pemerintah merealokasi anggaran desa untuk tanggap COVID-19. Advokasi kepada pemerintah desa terus dilakukan, Caritas Maumere terus berkoordinasi dengan tokoh masyarakat dan pemerintah desa. Advokasi kepada instansi pemerintah (Dinas Lingkungan Hidup) di tingkat kabupaten juga dilakukan sehingga meskipun kegiatan PRB belum masuk dalam program Desa, namun masih dapat diakomodasi dalam program pemerintah melalui Dinas Lingkungan Hidup dan mencakup desa-desa lainnya.



Penanaman pohon gamal oleh komunitas Korobhera

Kesimpulan VFL Korobhera, Kab. Sikka

1. Banjir, erosi, dan angin kencang merupakan ancaman prioritas bagi komunitas Korobhera. Namun, kekeringan menjadi ancaman utama komunitas saat kemarau tiba.
2. Reboisasi menjadi prioritas aksi yang diidentifikasi komunitas selain sistem irigasi, investasi dalam penguatan infrastruktur dan mitigasi
3. Kerugian akibat bencana sedikit meningkat dalam 5-10 tahun terakhir bagi anak-anak dan remaja.
4. Isu risiko bencana dan perubahan iklim belum dipertimbangkan dalam rencana pembangunan di wilayah setempat.
5. Perlindungan ekosistem belum cukup optimal untuk mendukung pembangunan ketangguhan.

Aksi yang dilakukan : Penanaman pohon di sekitar 2 sumber air (Ae Ke dan Ae Wuka di Dusun Magetake) dan pembuatan jebakan air

Kegiatan penanaman pohon dan pembuatan jebakan air/rorak dilaksanakan pada 5 Januari 2022 diikuti oleh 48 orang (38 laki-laki, 10 perempuan) melibatkan kepala desa, mantan ketua BPD, anggota TNI dari Koramil Paga, para tokoh adat, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, tokoh perempuan dan perwakilan pelajar dari SATAP Wara. Penanaman pohon diharapkan dapat menjaga ketersediaan air dan memberikan manfaat bagi 1216 warga Korobhera.

Jenis pohon yang ditanam dipilih berdasarkan karakteristik tanah yaitu waru dan gamal yang disiapkan sendiri oleh warga Korobhera. Selain penanaman pohon, jebakan air juga dibuat di 8 titik dekat dengan mata air Ae Ke dan Ae Wuka. Jebakan air ini dibuat untuk menjaga ketersediaan air dan mempertahankan kesuburan tanah. Jebakan air mencegah air hujan mengikis permukaan tanah yang kaya akan unsur hara. Setiap ketua RT bersama komunitas memantau pertumbuhan pohon dan dampak jebakan air setiap bulan untuk melihat perubahan aliran air. Advokasi kepada instansi pemerintah di tingkat kabupaten masih terus dilakukan agar kegiatan penanaman dan pemeliharaan pohon dapat menjadi program rutin yang dapat dilaksanakan dan direplikasi di daerah lain oleh instansi pemerintah seperti Dinas Lingkungan Hidup.



Pembuatan terasering di lereng Bu Watuweti



Keterlibatan anak-anak dalam aksi penanaman pohon

Kesimpulan VFL Bu Watuweti, Kab. Sikka

1. Longsor, banjir, dan angin topan merupakan 3 prioritas ancaman utama di masyarakat.
2. Reboisasi dan teknik pertanian tangguh adalah dua tindakan prioritas yang perlu diambil untuk mengatasi risiko.
3. Sebagian besar responden menyatakan bahwa kerugian akibat bencana sama saja dalam 5-10 tahun terakhir. Kekeringan kemungkinan besar akan dialami oleh generasi mendatang.
4. Bagi masyarakat, mekanisme pelibatan masyarakat dan alokasi anggaran untuk merespons risiko dan ancaman yang teridentifikasi belum ada.
5. Peningkatan kesadaran akan pelestarian ekosistem harus dilakukan kepada anak-anak dan remaja.

Aksi yang dilakukan : **Pembuatan terasering guludan dan penanaman pohon.**

Pembuatan terasering guludan dilaksanakan pada tanggal 18 Februari 2020 diikuti oleh 100 orang (79 laki-laki, 21 perempuan) di dusun Wolorea. Komunitas memadukan kegiatan ini dengan penanaman 1000 pohon bambu, gamal, kaliandra merah dan putih untuk memperkuat terasering dan mencegah tanah longsor. Bibit pohon dibeli dari kelompok tani setempat dan pemuda Katolik dari gereja. Kegiatan ini diharapkan dapat membawa manfaat bagi 1049 orang yang tinggal di 3 dusun (Wolorea, Wolosoko, Mbeja).

Dalam lokakarya perencanaan aksi komunitas pada 21 Oktober 2019, warga meminta agar kegiatan pembuatan terasering dapat dilakukan juga di 2 dusun terdampak longsor parah yaitu dusun Wolorea dan dusun Mbeja. Sementara pendanaan VFL mendukung kegiatan di Wolorea, pemerintah telah menganggarkan pembangunan turap (penahan longsor) dalam Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDDes) tahun 2020. Meski demikian, karena adanya realokasi anggaran untuk penanganan COVID pada tahun 2020, pembangunan turap belum dilakukan.



Penanaman pohon di sekitar mata air Done

Kesimpulan VFL Done, Kab. Sikka

1. Tiga ancaman prioritas utama meliputi banjir, tanah longsor dan angin topan.
2. Kurangnya kesadaran dan pendidikan serta kurangnya sumber daya menjadi hambatan dalam mengelola risiko.
3. Bagi lansia, penerapan kebijakan dan perbaikan sistem irigasi menjadi prioritas aksi yang harus dilakukan untuk mengurangi risiko.
4. Sudah ada kebijakan untuk mengatasi risiko meskipun masih dengan batasan.
5. Peningkatan kesadaran tentang perlindungan ekosistem penting dilakukan terutama bagi penyandang disabilitas dan anak-anak dan remaja.

Aksi yang dilakukan : Penanaman pohon di mata air Gomo Fai dan Kobhe Waturai di Desa Done.

Penanaman pohon dan pembuatan jebakan air dilakukan di mata air Gomo Fai di dusun Ladubewa dan mata air Kobhe Waturia di Watuwa pada tanggal 8 Februari 2020 diikuti oleh 51 orang (37 laki-laki, 14 perempuan) yang terdiri dari tokoh masyarakat, para aparat desa, aparat BPD, LINMAS/Hansip, para siswa dari SDI Ladubewa, Sekcam Magepanda. Kegiatan ini diharapkan dapat membawa manfaat bagi 1555 warga Done. Total ada 75 anakan pohon waru, ara dan beringin yang ditanam di sekitar mata air. Karena masih ada beberapa mata air yang perlu penghijauan, pemerintah desa memasukkan kegiatan penanaman pohon dan pembuatan jebakan air ke dalam Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDes) 2020 dan APBDes 2021 sementara dana yang tersedia digunakan untuk 2 mata air yang kritis dan menjadi tempat alternatif pengambilan air di musim kemarau. Advokasi kepada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) tetap dilaksanakan agar OPD dapat memasukan kegiatan yang berkaitan dengan reboisasi ke dalam Rencana Kerja OPD.



Penanaman anakan waru di pinggir pantai



Mempersiapkan anakan waru untuk penanaman

Kesimpulan VFL Kolisia B, Kab. Sikka

1. Banjir, erosi, dan kekeringan merupakan ancaman prioritas di masyarakat.
2. Prioritas konsekuensi antara lain gagal panen akibat bencana dan hilangnya sumber air bersih.
3. Sebagian responden komunitas menyebut kerugian akibat bencana sedikit meningkat dalam 5-10 tahun terakhir
4. Pelibatan masyarakat oleh OMS telah dilakukan dalam perencanaan, pelaksanaan dan berbagi pengetahuan meskipun belum dilakukan secara konsisten.
5. Mekanisme untuk memastikan keterlibatan masyarakat dalam pembangunan ketahanan dan alokasi anggaran khusus untuk mengurangi risiko belum memadai.
6. OMS belum mampu secara optimal mempengaruhi koherensi antara strategi PRB, adaptasi perubahan iklim dan pengentasan kemiskinan di tingkat lokal.

Aksi yang dilakukan : Penanaman 2000 anakan waru di pantai Nawuteu dan Kolisia.

Komunitas Kolisia B sepakat untuk menanam 2000 anakan waru di pantai Kolisia dan Nawuteu pada 28 Oktober 2020. Kegiatan tersebut rencananya dilaksanakan pada awal tahun 2020 namun tertunda karena pemberlakuan PPKM untuk mencegah penyebaran COVID-19. Kegiatan penanaman pohon diikuti oleh sekitar 54 orang (34 laki-laki, 20 perempuan) dari 5 kelompok masyarakat antara lain Bintang Timur, Cahaya Baru, P3A, Sumur Bor III, dan Boga Sama. Waru dipilih karena dapat beradaptasi dengan baik di lingkungan pesisir dan mampu mengurangi risiko banjir dan erosi. Pohon waru juga menyimpan air selama musim hujan.

Menindaklanjuti kegiatan ini, komunitas Kolisia B berkomitmen untuk menjaga dan merawat pertumbuhan pohon tersebut. Pemerintah desa juga telah berkomitmen untuk mengembangkan peraturan desa untuk perlindungan lingkungan; salah satunya larangan untuk tidak membiarkan ternak (kambing) dilepaskan di sekitar pantai. Warga telah membuat pagar pengaman di masing-masing lokasi. Sedikitnya 1307 warga yang tinggal di 3 dusun (Dusun Edo, Dusun Kolisia dan Dusun Nawuteu) diharapkan mendapat manfaat dari kegiatan ini.

Kesimpulan VFL Oekiu, Kab. Timor Tengah Selatan (TTS)

1. Angin puting beliung, kekeringan, dan tanah longsor merupakan 3 ancaman utama dari perspektif komunitas.
2. Bagi laki-laki, perempuan, dan anak-anak kerugian bencana meningkat secara signifikan dalam 5-10 tahun terakhir.
3. Angin puting beliung akan menjadi salah satu ancaman yang paling signifikan dirasakan oleh generasi mendatang, selain ancaman kekeringan yang meningkat
4. Pemerintah telah melakukan pemantauan dengan melibatkan perwakilan masyarakat untuk memantau perkembangan ketahanan.
5. Masyarakat belum dapat mengakses sumber daya untuk mengelola risiko

Aksi yang dilakukan : **Advokasi manajemen risiko terpadu dari tingkat desa hingga kabupaten.**

Kesimpulan VFL Oelbiteno, Kab. Kupang

1. Kekeringan menjadi salah satu ancaman prioritas di masyarakat, selain tanah longsor dan angin puting beliung.
2. Tindakan prioritas untuk mengatasi ancaman meliputi investasi penguatan infrastruktur dan mitigasi, manajemen layanan dasar dan diversifikasi mata pencaharian.
3. Hambatan mengatasi ancaman antara lain kurangnya aksi pemerintah, situasi geografis dan kurangnya akses ke teknologi dan fasilitas, dan juga kebijakan ekonomi
4. Tren kerugian akibat bencana dalam 5-10 tahun terakhir sedikit meningkat pada lansia, dan signifikan bagi penyandang disabilitas, anak-anak, dan perempuan
5. Pelibatan masyarakat oleh OMS belum dilakukan secara konsisten pada tahap pengkajian, perencanaan, pelaksanaan dan peningkatan kapasitas.
6. Pendekatan berbasis lingkungan belum dipertimbangkan dalam rencana pembangunan.

Aksi yang dilakukan : **Penguatan kapasitas bagi pemerintah daerah dan masyarakat untuk membangun ketahanan terhadap bencana.**

Perencanaan aksi komunitas dilakukan di Desa Oelbiteno dan Oekiu oleh Care Peduli didukung Partners for Resilience Indonesia. Selama COVID-19, Care berkoordinasi dengan pemerintah di tingkat provinsi, kabupaten, dan desa. Penguatan kapasitas dilakukan melalui pertemuan virtual yang melibatkan relawan desa untuk mengatasi isu-isu terkini, peran strategis pemerintah desa dan relawan dalam mitigasi risiko dan membangun komunikasi yang efektif antara pemangku kepentingan dan masyarakat untuk menyampaikan pesan-pesan kunci selama COVID-19. Melalui penguatan kapasitas, masyarakat mampu menyuarakan kebutuhan mereka dan membangun dialog dengan pengambil keputusan dengan mengacu pada setiap kebijakan atau program yang dikeluarkan oleh pemerintah. Selama April hingga Mei 2020 Care Peduli dan mitra pelaksanaannya melakukan advokasi pengelolaan risiko terpadu dari tingkat desa hingga kabupaten.

CERITA DARI GARDA DEPAN



Ibu Tugirah tinggal di Dusun Sidomulyo, Desa Sampang, Kabupaten Gunung Kidul. Desa ini terletak di kawasan perbukitan, dengan Dusun Sidomulyo berada di daerah yang paling tinggi. Kawasan ini sejak dulu merupakan kawasan yang kekurangan air dan rawan kekeringan, terutama di musim kemarau. Seperti kebanyakan warga RT 01 lainnya, bu Tugirah mendapatkan air bersih dari jaringan air bersih yang bersumber dari beberapa mata air di sekitar wilayah tempat tinggal mereka. Walaupun jaringan ini mendapatkan pasokan air dari beberapa mata air, tetap saja air yang didapatkan belum mampu mencukupi kebutuhan warga pengguna. Akibatnya kelompok harus

menerapkan sistem penutupan jaringan bergilir. Selain itu, biasanya warga juga masih harus tetap membeli air bersih menggunakan truk tangki, dengan harga Rp 200.000 - Rp 250.000 per tangki, terutama di puncak musim kemarau. Alternatif lain adalah mengambil air dari sumber yang berada di RT lain, yang biasanya dilakukan oleh perempuan dengan menggunakan jerigen. Usia Ibu Tugirah yang sudah lanjut membuatnya tidak lagi mampu melakukan alternatif ini, sehingga bila puncak musim kemarau tiba, Ibu Tugirah terpaksa mengeluarkan dana lebih untuk membeli air dari truk tangki.

Pada bulan Agustus sampai dengan bulan September tahun 2021 yang lalu, dengan dukungan dana VFL, dilaksanakan pendalaman salah satu sumur yang memasok air bersih ke kelompok pengguna air. Sumur tersebut terletak di lahan salah seorang warga di daerah persawahan utara pemukiman RT 01. Proses pendalaman sumur dilaksanakan selama dua minggu. Hasilnya, sumur tersebut bertambah debit airnya, dari yang sebelumnya sekitar 5.000 liter per hari menjadi 7.500 liter per hari.

Pendalaman sumur telah berhasil menambah input air bersih ke dalam jaringan air bersih milik warga RT01 dan RT02. Bagi Ibu Tugirah, hal ini berarti beliau mempunyai akses air yang dapat diandalkan. Selain mempermudah akses terhadap air bersih, bertambahnya volume air bersih juga berarti berkurangnya ketergantungan terhadap truk tangki. Pengeluaran Ibu Tugirah untuk keperluan air bersih bisa dikurangi, sehingga beliau bisa mengalihkan dana yang sebelumnya digunakan untuk membeli air truk tangki, ke pemenuhan kebutuhan rumah tangga dan keperluan kesehatan.

B. Aksi di Tingkat Nasional

Temuan dan kesimpulan, baik di tingkat masyarakat maupun di tingkat nasional, menjadi dasar untuk melakukan kegiatan advokasi. Di tingkat nasional, dua isu utama diidentifikasi VFL 2019 antara lain; (1) kurangnya keterlibatan aktor lokal yang berisiko dalam proses pengambilan keputusan untuk mengakses sumber daya dan memperkuat ketahanan dan bahwa (2) perencanaan pembangunan lokal tidak selalu mempertimbangkan informasi risiko bencana. Dengan mempertimbangkan isu-isu kunci tersebut, perumusan rencana advokasi dimulai dengan memetakan aktor di tingkat pemerintah, kebijakan/peraturan, dan para pemangku kepentingan baik di tingkat nasional, daerah, dan lokal terkait.



Konsultasi Hasil Temuan Awal VFL 2019 sebelum GPDRR 2019

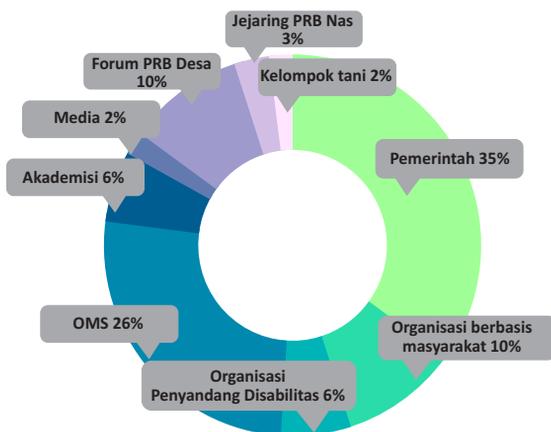
Upaya advokasi di tingkat nasional bertujuan untuk (1) Meningkatkan aksesibilitas dan inklusi kelompok paling berisiko dalam proses pengambilan keputusan terkait PRB dan ketangguhan di tingkat lokal serta (2) Memperkuat kolaborasi Organisasi Masyarakat Sipil untuk memperkuat suara komunitas sehingga pemangku kebijakan dapat mendengar prioritas bencana dari perspektif lokal dan proses pengambilan keputusan berdasarkan informasi risiko.

Untuk itu, rangkaian pertemuan untuk mendorong upaya advokasi ini dilakukan antara lain bersama Planas PRB, Direktorat Pencegahan BNPB, dan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, serta Kementerian Dalam Negeri. Selain mendiskusikan proses dan kesimpulan VFL, dialog-dialog ini dilakukan untuk mendapatkan pemahaman bersama tentang proses dan mekanisme perencanaan pembangunan di tingkat lokal yang telah dilakukan dan upaya untuk memperkuat perencanaan pembangunan yang berbasis informasi risiko dan diselenggarakan secara inklusif.

Workshop Multistakeholder : Memperkuat Perencanaan Pembangunan Desa yang Inklusif dan Berbasis Informasi Risiko Bencana untuk Ketangguhan Masyarakat

Workshop multi stakeholder diselenggarakan sebagai ruang dialog bagi para pemangku kepentingan yang lebih luas dalam menjajaki kolaborasi dan kemitraan untuk memperkuat perencanaan pembangunan desa yang inklusif dan berbasis informasi risiko bencana.

Workshop nasional ini diselenggarakan secara virtual melalui zoom pada 22 November 2021 diikuti 113 orang yang terdiri dari seluruh organisasi mitra VFL 2019, Komite Penasihat Nasional, anggota GNDR di Indonesia, jaringan PRB, organisasi penyandang disabilitas, media, organisasi lintas iman, pendamping desa, Pemerintah di tingkat nasional hingga desa serta komunitas di garda depan yakni kelompok perempuan, kelompok tani, tim siaga desa, dan sebagainya. Workshop menyediakan juru bahasa isyarat dan closed caption untuk mengurangi hambatan dalam berpartisipasi.



Komposisi Partisipasi dalam Workshop Multistakeholder

Pada sesi panel, workshop menghadirkan pembicara dari perwakilan organisasi mitra VFL, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT), Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), BNPB, dan Planas PRB. Poin-poin yang disampaikan antara lain:

- Berkaca dari VFL 2019, Komite Penasihat VFL 2019 menggarisbawahi 3 hal yaitu (1) aspek lingkungan perlu masuk dalam triple nexus (*Humanitarian-Development-Peace*) artinya PRB termasuk di dalamnya informasi risiko bencana dan rencana pembangunan mencakup tiga aspek (sosial, ekonomi, dan lingkungan) hingga ke lingkup terkecil yaitu desa, (2) proses

perencanaan yang inklusif penting dilakukan dengan memastikan aksesibilitas (fisik, informasi, sumber daya), data terpilah, mekanisme baik formal dan informal untuk komunitas berisiko juga dapat terlibat dalam proses pengambilan keputusan, (3) peran organisasi masyarakat sipil untuk membuka lebih banyak ruang pertukaran pembelajaran, memfasilitasi komunitas dan aktor-aktor di tingkat lokal untuk penguatan kapasitas, dan kolaborasi antara organisasi masyarakat sipil. Kerangka Sendai menekankan pendekatan yang "berpusat pada masyarakat", untuk itu membangun kesiapan masyarakat sebagai aktor utama menjadi penting dilakukan dengan cara penguatan kapasitas dan proses pelibatan yang inklusif dan partisipatif.

- Perwakilan dari Organisasi mitra VFL 2019 menekankan tiga tantangan konkrit terkait perencanaan pembangunan desa yang inklusif dan berbasis risiko antara lain (1) minimnya pelibatan kelompok berisiko dalam forum-forum ini, (2) belum selarasnya berbagai peraturan nasional dan daerah yang mempengaruhi implementasi di tingkat lokal, dan (3) durasi sistem perencanaan yang panjang. Hasil kajian VFL dapat digunakan salah satunya sebagai bahan masukan bagi desa dalam penyusunan dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah 6 tahun di tingkat desa. Hal ini dapat memperkuat analisis dari setiap program yang diusulkan.

"Di lapangan, keterlibatan masyarakat dan kelompok paling berisiko dalam forum perencanaan pembangunan masih minim, sehingga program untuk menyoal kelompok tersebut tidak berjalan dengan baik karena tidak berdasarkan pengalaman mereka. Sebagian besar masyarakat tidak melihat perbedaan antara aksi pengurangan risiko bencana dan perubahan iklim" Daniella Loupatty (Yayasan Walang Perempuan)



- Kemendes PDTT mengakui bahwa perencanaan desa belum seluruhnya berbasis data termasuk untuk mitigasi bencana. Untuk itu, Sistem Informasi Desa⁴ berbasis 1 peta (tata ruang dan pola ruang termasuk pemanfaatan lahan) dapat dioptimalkan sebagai acuan untuk perencanaan dan pemetaan risiko bencana di desa. Saat ini, juga terdapat pendataan SDGs desa sebagai salah satu cara untuk menerjemahkan kerangka global hingga ke lingkup desa dimana jika program desa

⁴Sistem Informasi Desa Nasional merupakan wadah terpadu untuk menginformasikan kepada masyarakat, pemerintah desa, Kementerian, lembaga, satuan kerja perangkat daerah, dan lembaga lain (K/L/D/I) tentang kondisi desa, perencanaan dan pemberdayaan pembangunan, serta capaian pembangunan yang telah dicapai oleh desa. Informasi dalam platform ini diperoleh berdasarkan data SDGs Desa, Indeks Bangunan Desa (IDM), Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa), dan Dana Desa <https://sid.kemendes.go.id/>

menerapkan SDGs, maka akan berkontribusi 70% capaian SDGs nasional. Desa tidak mungkin menyelesaikan persoalan sendiri karena ada batasan kewenangan desa, sehingga perlu adanya supra desa. Dalam program Kemendes "Desa Membangun, Membangun Desa", Desa membangun artinya desa mampu merencanakan sendiri programnya dengan pendanaan desa, sementara Membangun Desa adalah peran dari supra desa. Koordinasi lintas sektor perlu dilakukan untuk melakukan pembangunan desa pada RPJMD Kabupaten/Kota dan Renstra OPD (Organisasi Perangkat Daerah).

- Kemendagri menegaskan kembali kebijakan Kemendagri terkait pembangunan desa, salah satunya melalui Peraturan Menteri dalam negeri nomor 20 tahun 2018 tentang pengelolaan keuangan desa dimana program yang strategis di bidang penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak dapat dimasukkan dalam anggaran desa.
- BNPB sejak tahun 2020 telah menerbitkan katalog desa rawan bencana mengingat sekitar 80% desa di Indonesia adalah wilayah rawan bencana. Selain itu, BNPB telah menyusun modul penilaian ketangguhan desa/kelurahan bersama Kemendes dan Kemendagri termasuk BSN (SNI 8357-2017) sebagai data dasar sehingga ketangguhan masyarakat dapat terukur. Kajian penilaian ini penting dilakukan sebelum program masuk ke desa, sehingga dapat terlihat perbandingan hasilnya. Ketangguhan desa menggarisbawahi keterlibatan aktif 5 keterwakilan dalam setiap kegiatan antara lain keterlibatan pemerintah dan masyarakat, perwakilan per wilayah serta perwakilan sesuai dengan kelompok jenis kelamin, kelompok umur dan kelompok rentan.
- Platform Nasiona (Planas) | PRB mencatat beberapa hal penting dalam memastikan proses perencanaan desa yang berbasis risiko dan inklusi yakni:
 - ▶ Untuk menjamin proses yang inklusi dan partisipatif perlu diakui bahwa akan memerlukan sumber daya yang memadai namun bukan tidak bisa dilakukan. Upaya-upaya pelibatan masyarakat dengan perangkat yang ada seperti mengidentifikasi kalender musim, transek, peta desa, dan sebagainya menjadi salah satu cara untuk memastikan hal ini. Prinsip pengelolaan risiko bencana berbasis komunitas yang menggarisbawahi proses, dalam arti pelibatan komunitas termasuk yang berisiko secara aktif di setiap tahapan bukan hanya keluaran (output) seperti peta, kesiapsiagaan, organisasi.
 - ▶ Perlu disadari bahwa data dan informasi kebencanaan saat ini belum mendapatkan tempat dalam data-data desa dan pembangunan, misalnya profil desa belum dilengkapi identifikasi risiko. Maka, selain

aksi-aksi PRB baik praktik baik maupun pembelajaran di komunitas, aksi yang berkaitan dengan integrasi PRB dalam perencanaan di desa juga penting untuk dikawal dan didokumentasikan.

- ▶ Penting untuk memberikan ruang pengembangan dan aplikasi bagi fasilitator desa.
- ▶ Dikotomi atau penyekatan/ pembatasan jenis program lebih baik dibaurkan untuk mampu mencakup berbagai aspek.
- ▶ Pembangunan tidak hanya fisik, namun juga seluruh aset masyarakat.

"Bisa saja program-program yang berkaitan dengan PRB tidak disebutkan secara eksplisit, tidak menutup kemungkinan program-program PRB juga tersirat dalam program-program lain. Inovasi program PRB, misalnya Sistem Informasi Desa terkait kebencanaan dalam hal digitalisasi data, termasuk kebutuhan untuk mendasarkan semuanya pada data. Untuk exit strategy, perlu ada transfer data dan informasi ke pemerintah desa." Nini M. Jannah (Sekjen Planas PRB)



Workshop ini menghasilkan rekomendasi antara lain :

1. Prioritas isu PRB masuk dalam kewenangan berskala desa yang dilegalkan melalui peraturan kepala daerah.



2. Dukungan dari supra desa terutama untuk mempercepat perencanaan pembangunan yang inklusif dan berdasarkan informasi risiko. Salah satunya penguatan pendamping desa, perangkat dan komunitas desa dalam meningkatkan pengetahuan, pemahaman, dan distribusi informasi kajian risiko bencana.



3. Pengelolaan data dan utilisasi data yang digunakan dan dirujuk dalam perencanaan pembangunan memanfaatkan sistem informasi desa yang dilengkapi dengan data kajian risiko.



4. Peningkatan kesadaran inklusi disabilitas dan kelompok berisiko lainnya dalam tanggap darurat dan pengelolaan risiko bencana menjadi prioritas aksi bersama yang penting dilakukan oleh lintas pihak.

CERITA DAMPAK

Terdapat dua faktor kunci untuk meningkatkan inklusi dan membangun kesiapsiagaan masyarakat yakni dengan membangun pemahaman komunitas akan risiko bencana dan mendukung inovasi berbasis komunitas yang merespons prioritas risiko yang mereka identifikasi dengan cara memastikan akses informasi dan sumber daya yang memadai.

VFL Indonesia mengambil momentum *Global Platform of Disaster Risk Reduction 2022* yang diadakan pada 23-25 Mei 2022 di Nusa Dua, Bali untuk mengangkat pesan ini sekaligus menampilkan aksi dari garda depan bagaimana masyarakat terlibat aktif dalam pencegahan, adaptasi, dan memperbaiki lingkungan yang mempengaruhi mata pencaharian mereka. Tiga kisah dipresentasikan oleh komunitas yang diwakili oleh kelompok tani dan perempuan pada 24 Mei 2022 di Rumah Resiliensi Indonesia--rangkain acara yang diselenggarakan bersamaan dengan GPDRR 2022 oleh Pemerintah Indonesia.

Komunitas berbagi cerita tentang bagaimana masyarakat mempraktikkan pertanian tangguh untuk beradaptasi dengan perubahan iklim baik di daerah perkotaan maupun pedesaan sekaligus memastikan inklusi dalam prosesnya. Kelompok tani berbagi inovasi yang mereka lakukan berupa irigasi kabut untuk mengurangi beban petani lanjut usia dalam mendistribusikan dan mengangkut air, mengurangi biaya pembelian air untuk penyiraman tanaman, mendorong penggunaan pupuk organik, dan mendorong keterlibatan generasi muda dalam pertanian. Perwakilan dari kelompok perempuan juga menyoroti pentingnya menempatkan sumber daya di tangan perempuan dan memastikan lingkungan yang mendukung perempuan akar rumput untuk merancang program berdasarkan pemetaan risiko, kebutuhan, dan kapasitas yang mereka lakukan bersama komunitas lokal. Kegiatan ini merupakan bentuk pengakuan akan inovasi dari masyarakat di garda depan yang telah memanfaatkan pengetahuan lokal dan pemetaan risiko masyarakat serta pembelajaran bersama tentang model pendanaan yang terbukti dapat mendukung pembangunan di tingkat lokal yang berbasis risiko dan dipimpin oleh komunitas. Sesi ini juga menyoroti peran organisasi masyarakat sipil dan pemangku kepentingan yang berbeda untuk membantu komunitas memfasilitasi dan mempromosikan konvergensi pengurangan risiko bencana, adaptasi perubahan iklim dan isu-isu pembangunan berkelanjutan, membantu masyarakat memahami risiko bencana seperti melalui pemetaan risiko masyarakat dan memanfaatkan data lokal untuk rencana pembangunan di wilayahnya.

Kesimpulan VFL menjadi masukan dalam survey OMS melalui GNDR dalam SFDRR Mid-term Review. Salah satu kesimpulan Ketua dalam Pleno Tinjauan Jangka Menengah dengan tema "Melampaui bahaya alam - mengoperasionalkan perluasan lingkup Kerangka Sendai" sejalan dengan pesan VFL yang menyerukan keseimbangan antara adaptasi dan mitigasi dengan mendorong keterlibatan yang inklusif dan bermakna dari komunitas berisiko seperti anak-anak, remaja, perempuan, dan penyandang disabilitas.

BAB III

REKOMENDASI DAN LANGKAH KE DEPAN

3.1 Rekomendasi

Rekomendasi VFL 2019 ditujukan untuk berbagai pemangku kepentingan pengurangan risiko bencana (setidaknya ada lima aktor yang sering disebut sebagai kolaborasi pentahelix termasuk pemerintah, akademisi, sektor swasta, masyarakat, dan media):

Pemerintah		Organisasi Masyarakat Sipil			Akademisi	Media	Sektor Usaha
Nasional	Lokal	Internasional	Nasional	Lokal			
#1 Menciptakan keterlibatan dan partisipasi yang proaktif dan sistematis dalam pengurangan risiko bencana dengan komunitas berisiko, terutama kelompok yang paling berisiko.							
#2 Memperkuat jejaring, kolaborasi, dan kapasitas advokasi dalam pengurangan risiko bencana inklusif (PRB) di tingkat lokal (yaitu Forum Pengurangan Risiko Bencana) dan tingkat nasional (yaitu Platform Nasional Pengurangan Risiko Bencana Indonesia) berdasarkan data dasar dan informasi risiko.							
#3 Mengembangkan perencanaan dan program kebijakan pengurangan risiko bencana yang partisipatif sebagai titik masuk strategis untuk meningkatkan kesadaran kritis dan pemahaman tentang risiko dan untuk membangun hubungan di antara para pelaku yang berbeda.							
#4 Menggunakan pengetahuan risiko bencana lokal sebagai dasar perencanaan pembangunan yang menghubungkan isu-isu manajemen risiko bencana, isu-isu pembangunan (kemiskinan, perkotaan-pedesaan), dan isu-isu lingkungan (adaptasi dan mitigasi perubahan iklim).							
#5 Mengembangkan strategi keuangan yang inovatif untuk mendukung inisiatif dan kemitraan tingkat lokal, termasuk solusi multi-finansial dan multiskala (nasional, internasional, dana pemerintah dan nonpemerintah, sektor swasta, pendidikan tinggi melalui berbagai kegiatan pemberdayaan masyarakat).							
#6 Memperluas cakupan geografis VFL karena Indonesia memiliki berbagai bahaya dan risiko serta latar belakang geografis, sosial ekonomi dan budaya yang berbeda.							
#7 Membuat (atau memanfaatkan yang ada) jaringan untuk berbagi praktik yang baik dan pembelajaran yang diperoleh dari VFL untuk meningkatkan komunikasi antara berbagai pemangku kepentingan dalam PRB (pemerintah pusat, pemerintah daerah, akademisi, sektor swasta, lembaga swadaya masyarakat, masyarakat).							

3.2 Keberlanjutan dan Langkah ke Depan

VFL 2019 yang dilakukan di Indonesia ini menunjukkan perlunya perencanaan pembangunan berbasis pengurangan risiko bencana dengan partisipasi dari masyarakat berisiko. Sementara bahaya dan bencana hidrometeorologi diprioritaskan oleh masyarakat, upaya tidak hanya terbatas pada jenis bahaya dan bencana tersebut. Pemahaman yang baik tentang risiko bencana harus mencakup segala kemungkinan bahaya di masa depan yang mungkin dihadapi oleh masyarakat (bahaya hidrometeorologi, geologi, atau bahkan biologis, seperti yang ditunjukkan oleh pandemi COVID-19). Pengetahuan dan pemahaman tentang risiko bencana perlu diikuti dengan perencanaan pembangunan yang inklusif dan partisipatif yang disesuaikan dengan wilayah dan berdasarkan kondisi nyata, dengan memasukkan saran dan pertimbangan dari semua pemangku kepentingan termasuk komunitas yang paling berisiko. Upaya meminimalkan risiko bencana tidak bersifat eksklusif, diperlukan kerjasama yang baik antara semua aktor (masyarakat, tokoh masyarakat, pemerintah, lembaga penelitian, lembaga swadaya masyarakat, swasta). Partisipasi masyarakat dan keterlibatan masyarakat adalah penting; namun demikian, strategi pengurangan risiko bencana juga memerlukan komitmen politik yang terintegrasi untuk meningkatkan pelaksanaan dan koordinasi kebijakan di tingkat nasional dan lokal.

Data, informasi dan hasil yang dikumpulkan dari kegiatan VFL 2019 dapat digunakan sebagai dasar untuk kegiatan organisasi masyarakat sipil yang terlibat di masa depan maupun untuk program-program PRB lainnya. Hasilnya perlu dikomunikasikan kepada pemerintah pusat (BNPB misalnya melalui Program Desa Tangguh Bencana dan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi melalui Dana Desa) dan pemerintah daerah (yaitu BPBD dan OPD di tingkat Kota/Kabupaten misalnya melalui Pemberdayaan Masyarakat Desa untuk Pengurangan Risiko Bencana, Perlindungan Lingkungan, forum rencana pembangunan desa). Selain itu, untuk VFL berikutnya, perlu memastikan data pilah berdasarkan usia, gender, disabilitas teridentifikasi secara konsisten pada setiap tahapan, serta melibatkan pemangku kepentingan lainnya, seperti sektor swasta yaitu perusahaan besar atau kecil dan menengah melalui tanggung jawab sosial perusahaan dalam program pengurangan risiko bencana dan adaptasi perubahan iklim, institusi pendidikan tinggi yaitu, pelibatan akademisi dan mahasiswa dalam program pengurangan risiko bencana dan adaptasi perubahan iklim melalui pendidikan, penelitian atau pemberdayaan masyarakat di wilayah studi). Kerja kolaboratif yang mengintegrasikan banyak pemangku kepentingan akan memberikan manfaat yang optimal bagi masyarakat.

Mitra Organisasi VFL 2019



Yayasan Walang Perempuan
Jl. Taman Makmur, Nusaniwe,
Kota Ambon, Maluku
yayasanwalangperempuan.wordpress.com



Caritas Keuskupan Maumere
Jl. Soegiyopranoto, Kelurahan Kota Uneng,
Kecamatan Alok, Maumere, NTT



Yayasan Mariamoe Peduli
Jl. Arabika Utara, Tenda, Kec. Langke
Rembong, Flores, NTT
yayasanmariamoe.blogspot.com



Perkumpulan Lingkar
Jl. Banteng Perkasa, Sinduharjo, Ngaglik,
Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta
www.lingkar.or.id



Solidaritas Perempuan Kinasih
Jln. Godean Km.6,5 Cokrobedog, Sidoarum
Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta
www.solidaritasperempuankinasih.com



Ikatan Pelaku Pemberdayaan Masyarakat
Indonesia (IPPMI) Yogyakarta
Jl. MT. Haryono, Yogyakarta



Resilience Development Initiative (RDI)
Jl. Sidomukti, Sukaluyu, Kec. Cibeunying
Kaler, Kota Bandung, Jawa Barat
www.rdi.or.id



Yayasan Care Peduli
Jl. Taman Margasatwa Raya, Ps. Minggu,
Kota Jakarta Selatan
www.careindonesia.or.id

